

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Sistematika Penulisan.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kemiskinan Struktural.....	7
2.2 Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki	9
2.3 Analisis Gender dalam Program Pembangunan di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Politik.....	13
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1. Ruang Lingkup Kajian	16
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
3.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan.....	17
3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	17
3.5 Kerangka Konsep yang digunakan dalam Penelitian	18
IV. PROFIL LOKASI PENELITIAN.....	20
4.1. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu dan Kemiskinan	20
4.2. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kemiskinan	21
4.3. Perempuan Miskin di Bengkulu Tengah	22
V. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG PENDIDIKAN	24
VI. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG EKONOMI	29
VII. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG KESEHATAN.....	40
VIII. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG POLITIK.....	53
IX. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG SOSIAL	60

X. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN, EKONOMI, KESEHATAN, DAN POLITIK	73
10.1. Bidang Pendidikan	73
10.2. Bidang Ekonomi.....	76
10.3. Bidang Kesehatan.....	80
10.4. Bidang Politik.....	82
10.5. Bidang Sosial.....	83
10.6. Sintesis Analisis Program dan Kegiatan dan Feminisasi Kemiskinan	85
XI. PENUTUP	93
11.1 Kesimpulan.....	93
11.2 Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

1	Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di Bengkulu Tengah	22
2	Indikator di bidang pendidikan Provinsi Bengkulu	24
3	Indikator di bidang pendidikan Bengkulu Tengah	26
4	Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang tertinggi di Provinsi Bengkulu	30
5	Indikator di bidang ekonomi terkait angkatan kerja di Provinsi Bengkulu	30
6	Penduduk Bengkulu berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Agustus 2015)	33
7	Penduduk Provinsi Bengkulu berumur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut golongan umur dan lapangan pekerjaan utama (Agustus 2015)	35
8	Indikator di bidang ekonomi terkait pengangguran di Provinsi Bengkulu	36
9	Penduduk Bengkulu Tengah berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dan pendidikan tertinggi	38
10	Indikator bidang ekonomi di Bengkulu Tengah	38
11	Indikator di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu (1)	40
12	Indikator di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu (2)	47
13	Indikator di bidang kesehatan di Bengkulu Tengah	50
14	Indikator di bidang politik di Provinsi Bengkulu	53
15	Jumlah Penduduk dalam Jabatan DPRD Provinsi Bengkulu	55
16	Daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu menurut hasil pemilihan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu tahun 2014	55
17	Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menurut hasil pemilihan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu tahun 2014-2019	56
18	Indikator di bidang politik di Bengkulu Tengah	57
19	Jumlah penduduk dalam jabatan DPRD Bengkulu Tengah	57
20	Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menurut partai politik tahun 2014	58
21	Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menurut partai politik tahun 2014-2019	59
22	Jumlah Korban Kekerasan menurut kelompok umur Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	62
23	Jumlah Korban Kekerasan menurut kelompok umur Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015	63
24	Jumlah perempuan dan anak menurut jenis kekerasan di Provinsi Bengkulu tahun 2014	64
25	Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015	65
26	Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	65
27	Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015	66
28	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	67
29	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut	68

	Tingkat Pendidikan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015	
30	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014– bulan Juni 2015	69
31	Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015	70
32	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	71
33	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sampai juni 2015	72
34	Daftar Program di Bidang Pendidikan	73
35	Daftar Program di Bidang Ekonomi	76
36	Daftar Program di Bidang Kesehatan	80
37	Daftar Program di Bidang Sosial	83

DAFTAR GAMBAR

1	Dampak akumulasi kemiskinan (Worldbank 2001)	9
2	AKI setiap 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014	44
3	Jumlah Penderita HIV/AIDS di Bengkulu Tahun 2009-2013	48
4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2010 S.D Juni 2015	60
5	Trend Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2011 S.D Juni 2015	61
6	Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur	74
7	Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Pendidikan antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa	75
8	Program dan Kegiatan di Bidang Ekonomi yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur	78
9	Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa	79
10	Program dan Kegiatan di Bidang Kesehatan yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur	81
11	Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Kesehatan antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa	82
12	Program dan Kegiatan di Bidang Sosial yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur	83
13	Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa	85
14	Jumlah Program dan Kegiatan di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik, dan Sosial berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur	86
15	Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa	88

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian mengenai feminisasi kemiskinan dilakukan pada tahun 2016 di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Harapan Makmur. Feminisasi kemiskinan merupakan keterwakilan perempuan muncul dalam bentuk kemiskinan yang merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan hasil dari ketimpangan relasi gender yang dialami perempuan dari laki-laki sehingga berdampak pada keterbelakangan perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial.

Feminisasi kemiskinan tergambar dalam profil feminisasi kemiskinan, namun juga pada struktur memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima perempuan dari program-program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial yang ada di tingkat kecamatan/desa selaku penerima program. Hal ini juga dilengkapi dengan data mengenai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diberikan berdasarkan penyusun program di tingkat Provinsi/Kabupaten. Dari sisi program dan kegiatan pembangunan sendiri dilihat dari 1) persepektif gender yang dimilikinya, yaitu netral, bias atau responsif gender maupun 2) kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif. Kajian dilakukan pada berbagai level yaitu pada level makro sebagai pembuat kebijakan ditingkat provinsi dan kota, serta pada level meso dan mikro sebagai penerima program/kegiatan pada tatanan kecamatan dan rumahtangga di desa. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Penelitian akan dilaksanakan dalam waktu tiga bulan yaitu mulai Mei hingga Juli 2016. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan tingginya proporsi kemiskinan yang dialami perempuan kepala keluarga atau perempuan dari keluarga miskin.

Metode yang digunakan dalam penentuan informan yang mengetahui program/kegiatan yang dijalankan di kabupaten dan provinsi adalah aparat pemerintah dari beragam kedinasan/SKPD bidang ekonomi, pendidikan,

kesehatan, dan politik yang kemudian dilihat sebagai penyusun program. Sementara itu penentuan responden berupa perempuan miskin yang dianggap mewakili komunitas desa dan kecamatan dilakukan dengan *purposive technique* dimana perempuan kepala keluarga. Kelompok ini dapat dikenali sebagai penerima program.

Dalam **bidang pendidikan**, program di Provinsi/kabupaten sudah memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama baik bagi perempuan maupun laki-laki juga di tingkat Kecamatan/desa. Namun sebanyak 71% program/kegiatan masih untuk memenuhi kebutuhan praktis. Hal ini juga menunjukkan bahwa program masih bersifat netral gender dari penyusun program dimana tidak dijalankan berdasarkan keberpihakan untuk memperbaiki posisi perempuan yang lebih banyak terpinggirkan dalam bidang pendidikan ini dari rata-rata lama sekolah dan rendahnya kepemilikan ijazah dibandingkan laki-laki.

Data di **bidang ekonomi** menunjukkan adanya kecenderungan bahwa program yang dijalankan di Provinsi/kabupaten lebih bersifat responsif gender bila dibandingkan di Kecamatan/desa yang netral gender dimana partisipasi perempuan sudah lebih banyak pada program dari Provinsi/kabupaten sementara di Kecamatan/desa jumlah program yang dikontrol laki-laki cukup tinggi. Hal ini terjadi di tengah isu mengenai rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pada perempuan dibandingkan laki-laki, maupun lebih banyak sebagai Pekerja yang tidak dibayar dan bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki. Subordinasi, ancaman beban ganda maupun dapat menyebabkan feminisasi kemiskinan karena posisi perempuan yang lebih rendah (tersubordinasi) dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan laki-laki dalam aktivitas ekonomi ini.

Dalam **bidang kesehatan**, terdapat kecenderungan sebagian besar program/kegiatan yang sudah memenuhi kebutuhan praktis. Laki-laki masih ada yang tampak memiliki kontrol pada bidang yang dilabelkan (*stereotype*) sebagai ranah perempuan (penjaga keluarga: suami dan anak) namun kerja ini tidak banyak menghasilkan penghasilan di balik kerja yang harus perempuan lakukan. Situasi perempuan yang harus dihadapi adalah laki-laki yang memiliki kontrol dalam program, rawannya perempuan yang terkena penyakit menular seksual, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta banyaknya alat KB untuk

perempuan. Hal ini menggambarkan masih adanya subordinasi pada diri perempuan menjadi faktor yang menyebabkan menguatnya feminisasi kemiskinan. Dengan demikian maka program di bidang kesehatan ini lebih bersifat bias gender yang menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan.

Musrenbang sebagai salah satu program di **bidang politik** yang sudah memenuhi kebutuhan strategis dimana memberikan peluang bagi perempuan untuk menyatakan kebutuhannya sehingga ia dapat menjadi lebih setara dengan laki-laki. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD belum terpenuhi. Meskipun program kuota 30% perempuan sebagai Calon Anggota Tetap dalam partai politik tersebut sudah responsif gender. Namun masyarakat Bengkulu Tengah yang ditengarai memiliki konstruksi budaya yang menjadikan ajaran agama Islam sebagai prinsip dalam berperilaku keseharian juga tampak memberikan pengaruh pada konstruksi peranan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat dimana laki-laki lebih dianggap mampu sebagai pemimpin dibandingkan perempuan sebagai warga kelas dua (subordinasi) dalam aktivitas publik. Hal inilah yang menjadikan perempuan tidak dapat memberikan suara terbanyaknya dalam parlemen untuk menyusun program yang responsif gender di bidang pemenuhan hak hidup lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun politik itu sendiri.

Dalam **bidang sosial**, ditemukan bahwa program/kegiatan sudah dibuka aksesnya untuk bersama (laki-laki dan perempuan). Dominasi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat program atau kegiatan oleh bersama (laki-laki dan perempuan) ini lebih banyak terjadi di Kecamatan/Desa dibandingkan pada program dari provinsi/kabupaten. Jumlah program/kegiatan di Kecamatan/desa di bidang ini lebih banyak (semuanya) cenderung pada pemenuhan praktis (79%) dibandingkan dari Provinsi/kabupaten. Meski sebetulnya data menunjukkan adanya masalah sosial berupa kekerasan yang lebih banyak dialami perempuan dengan latar belakang SLTP dan SLTA maka dengan identifikasi program saat ini sifatnya adalah netral gender karena belum memihak salah satu jenis kelamin.

Dengan demikian maka secara umum program/kegiatan di lima bidang tersebut cenderung netral gender atau tidak menunjukkan keberpihakan sasaran program untuk laki-laki saja atau perempuan. Hal ini dikarenakan beberapa

program ditujukan kepada peningkatan kualitas keluarga yang menempatkan suami dan istri sebagai sasaran program. Program tersebut turun dan menjadi netral gender karena tidak didasarkan pada data terpilah gender. Oleh karena itu untuk ke depan penyusunan data terpilah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan secara melembaga. Terlebih lagi dengan lebih dominannya program/kegiatan yang memenuhi kebutuhan praktis sehingga belum mampu memberikan kesadaran bagi perempuan untuk memperbaiki posisinya dibandingkan laki-laki, misalnya dalam aktivitas pembagian tugas dalam rumantangga, perluasan aset lahan maupun kredit, serta mengurangi kekerasan pada perempuan, sehingga muncul kemiskinan pada perempuan (femnisiasi kemiskinan).

Dari uraian di atas terlihat bahwa program/kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial yang dijalankan sejak dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga akhirnya di desa sudah lebih banyak program yang dapat diakses dan melibatkan (partisipasi) oleh bersama baik oleh perempuan dan laki-laki. Namun banyak program/bidang yang masih menunjukkan adanya laki-laki sebagai pemegang kontrol dari partisipasi perempuan dalam program/kebijakan tersebut. Hal ini mencerminkan masih kuatnya konstruksi sosial nilai patriarki pada masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan tersebut. Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari sumberdaya berupa program dan kegiatan yang ada diakses warga inilah yang dianggap sebagai akar penyebab feminisasi kemiskinan.

Data juga menunjukkan masih belum memadainya pemahaman yang dimiliki oleh aparat pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Oleh karena itu perlu lebih digiatkan lagi tentang Pengarustamaan Gender (PUG). PUG merupakan instrument memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Jika tidak mengarusutamakan gender maka program yang dijalankan pun termasuk dalam netral gender yang berarti akan tetap terjadi ketimpangan gender dalam kebijakan yang disusunnya.

Hal ini dirasakan cukup mendesak dengan adanya Permendagri No 15 th 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah. Rekomendasi di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, termasuk di Provinsi Bengkulu ini. Dengan kondisi ini maka rekomendasi di tingkat provinsi dan kabupaten adalah:

1. Mendorong berjalannya kelembagaan PUG dengan prasyarat seperti:
 - a) komitmen;
 - b) kebijakan yang eksplisit di tingkat daerah,
 - c) struktur pemerintah seperti unit PUG untuk memastikan diselenggarakannya pengintegrasian perspektif gender;
 - d) sumberdaya yang memadai;
 - e) data terpilah; dan
 - f) alat analisis gender; dan
 - g) partisipasi masyarakat dalam mengontrol pada pemerintah.
2. PUG akan mengasilkan program strategis dan responsif gender untuk mengurangi ketimpangan perempuan dan laki-laki sehingga dapat mengurangi kemiskinan pada perempuan, seperti:
 - a) Perlindungan kekerasan pada korban;
 - b) Penyadaran hak perempuan dan kepemimpinan; dan
 - c) Pendidikan politik yang melibatkan perempuan
3. Menggandeng BAPPEDA agar sensitif gender dengan menyediakan alokasi penganggaran dari program yang responsive gender
4. Akun penganggaran PPRG agar menjadi Rencana Aksi Daerah yang akan diteruskan menjadi program SKPD.

Sementara itu rekomendasi di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan program melalui Musrenbang paling sedikit dihadiri oleh 30% perempuan dan adanya potensi bahwa usulan perempuan akan diakomodir
2. Penyusunan data terpilah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan secara melembaga sebagai dasar penyusunan program yang responsif gender

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Negara-negara berkembang maupun di Negara maju, bukan lagi hanya fokus pada peningkatan pendapatan nasional atau hanya semata-mata menambah produksi barang-barang dan jasa. Pembangunan saat ini mengandung unsur hakiki yaitu membangun manusia seutuhnya baik jasmani maupun rohani dan merubah nasib manusia agar keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah meningkatnya kualitas hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diperlihatkan dengan beberapa parameter penting seperti: 1) meningkatnya derajat kesehatan penduduk: 2) meningkatnya tingkat pendidikan penduduk: dan 3) menurunnya jumlah penduduk miskin. Penurunan kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci dalam mengungkit keberhasilan pembangunan. Partisipasi penuh dan setara antara dari laki-laki dan perempuan diperlukan dalam penghapusan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada manusia, yaitu pada perempuan dan laki-laki sebagai agen pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Seperti yang tertuang dalam *Principle 5- Rio Declaration on Environment and Development (1992): All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world.*

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menandatangani beberapa kesepakatan dalam forum internasional yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, antara lain *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979, *Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA)* pada 1995, *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2001 yang kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun

2014. Kebijakan tersebut dipilih untuk memberikan manfaat pembangunan yang sama pada laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya penerima manfaat pembangunan tidak selalu merata bagi seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, dimana laki-laki lebih banyak menerima manfaat pembangunan dibanding perempuan. Seperti yang diuraikan ILO (2004) bahwa sebagian besar orang miskin di Indonesia adalah perempuan, serta adanya kecenderungan peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena ini sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan.

Feminisasi kemiskinan dengan jelas menggambarkan ketidakadilan dalam soal keterwakilan perempuan di antara orang miskin dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, kaum perempuan miskin lebih menderita karena pada sebagian besar masyarakat dijadikan subyek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum.

Kerentanan kemiskinan yang dialami oleh perempuan ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 antara lain dari bidang pendidikan yang dilihat dari persentase nasional penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah menurut jenis kelamin. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2012 lebih besar dari pada laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah secara nasional tahun 2012 yaitu sebesar 7,37 %, sedang laki-laki lebih sedikit yaitu hanya 3,10 %. Indikator lain yang sebagai penyebab kerentanan kemiskinan yang dialami perempuan adalah jenis pekerjaan, lapangan kerja, upah, dan keterwakilan politik (ILO, 2004).

ILO (2004) melihat adanya pengaruh dari ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai akar dari munculnya kemiskinan. Berdasarkan data Sakernas 2011-2014, Ritonga (2014) menyatakan rasio kesempatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2014, ditemukan rasio kesempatan kerja 78.3 % pada laki-laki dan 47.1 % pada perempuan. Demikian

pula tingkat pengangguran terbuka ditemukan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2014 sebesar 5.75 pada laki-laki dan 6.26 pada perempuan. Data lain terkait rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja yaitu data perbandingan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki Indonesia yang menunjukkan perbedaan yang cukup besar, dimana TPAK perempuan yaitu sebesar 51,39 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 84,42 persen (Sakernas, 2012). Angka partisipasi kerja kepala keluarga perempuan secara nasional menunjukkan bahwa dari persentase kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14,42% ternyata hanya 60,67 % yang bekerja. Sedangkan untuk kepala rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 85,58 % yang bekerja sebanyak 93,19% atau hampir seluruhnya. Berdasarkan BPS (2016) terlihat adanya peningkatan kemiskinan pada perempuan sebagai kepala rumahtangga dari 14.42% tahun 2014 menjadi 15.23% tahun 2015.

Di Indonesia, nilai-nilai yang diberlakukan dalam masyarakat dapat berupa pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah. Beberapa nilai sosial juga dapat mempengaruhi asupan nutrisi bagi wanita, misalnya dalam hal pembagian makanan dalam keluarga yang mengutamakan untuk pria dan anak laki-laki. Ketika sumberdaya dalam keluarga itu terbatas, akses ke pendidikan juga akan diutamakan kepada anak laki-laki. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui profil feminisasi kemiskinan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik, yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Profil feminisasi kemiskinan dapat dilihat dari adanya isu gender dalam praktek keseharian perempuan kepala keluarga atau perempuan miskin dalam memanfaatkan sumberdaya seperti akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik dalam lingkup komunitas, desa hingga kota.

Disatu sisi perempuan mempunyai akses dan kontrol yang terbatas pada sumberdaya, namun disisi lain dengan keterbatsannya perempuan mengalokasikan sebagian besar sumberdaya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dasar

keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar sumberdaya atau penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi dan *drop out* sekolah. Dengan kata lain apabila berhasil menanggulangi kemiskinan perempuan, maka akan memiliki dampak ganda dan lebih besar pada perbaikan kualitas hidup manusia.

Oleh karena itu diperlukan kajian untuk menganalisis berbagai keadaan dan penyebab terjadinya kemiskinan pada perempuan, khususnya perempuan kepala rumahtangga atau perempuan miskin, dimana hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan di masyarakat dinilai sebagai salah satu faktor yang membuat lebih banyak wanita miskin, dan perempuan miskin jauh lebih menderita karena kemiskinan dan diskriminasi termasuk kekerasan di dalamnya.

Berbicara mengenai kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah tidak lepas dari pengamatan atas kondisi ukuran kualitas hidup manusia di dalamnya dalam ukuran ini lazim disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG). Terdapat peningkatan IPM Provinsi Bengkulu sejak tahun 2009 yang sebesar 72.55. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan IPM Indonesia yang sebesar 71.76 namun provinsi ini masih memiliki 18.3 persen jumlah penduduk miskin sehingga berada di urutan 9 di pada tahun 2010. Pada tahun 2015 ini provinsi ini berada di urutan 9 berdasarkan Garis Kemiskinannya.

Pada tahun 2014 lalu IPG Provinsi Bengkulu sebesar 91.02 (BPS Bengkulu 2014) dimana IPG Indonesia adalah sebesar 92.28 (BPS Nasional 2014). IPG Bengkulu Tengah sendiri adalah sebesar 84.68 yang menunjukkan adanya pembangunan mengindikasikan masih adanya ketimpangan gender dibandingkan ukuran di Bengkulu atau Indonesia. Data BPS menunjuk angka 14% untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan. Survei PEKKA tahun 2012 menunjukkan bahwa keluarga yang dikepalai perempuan mencapai 24%, dan tidak kurang dari 60% mereka berada strata termiskin dalam masyarakat (PEKKA, 2014).

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui kebijakan, program, dan kegiatan dari SKPD merupakan stakeholder utama dalam pengarusutamaan gender sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional. Aturan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengarusutamakan gender dalam semua tahapan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dirasakan cukup mendesak dengan adanya Permendagri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah. Pelaksanaannya pun sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015– 2019 yang menyatakan pentingnya untuk mengarusutamakan gender bersama Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dampak dari kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial budaya di Provinsi Bengkulu. Peningkatan kualitas hidup perempuan dilihat melalui akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh perempuan atas program. Selain itu program juga dilihat sejauhmana program dapat responsif gender dan memenuhi kebutuhan strategis untuk meningkatkan posisi tawar perempuan terhadap laki-laki dan memperoleh kesempatan memenuhi hak-hak dasar. Oleh karena itu dalam kajian penyebab feminisasi kemiskinan di Provinsi Bengkulu ini juga terkait dengan analisis kebijakan, program, dan kegiatan dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan swasta pada aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial.

1.2 Tujuan Penulisan

Umum

Mengkaji dan menganalisis feminisasi kemiskinan serta dampak kebijakan, program, dan kegiatan pada kualitas hidup perempuan dan perwujudan keadilan dan kesetaraan gender perempuan di Provinsi Bengkulu.

Khusus:

1. Mengkaji dan menganalisis profil feminisasi kemiskinan dari bidang pendidikan
2. Mengkaji dan menganalisis profil feminisasi kemiskinan dari bidangekonomi

3. Mengkaji dan menganalisis profil feminisasi kemiskinan dari bidang kesehatan
4. Mengkaji dan menganalisis profil feminisasi kemiskinan dari bidang politik
5. Mengkaji dan menganalisis profil feminisasi kemiskinan dari bidangsosial
6. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan, program, dan kegiatan pada bidangekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial dari SKPD dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perwujudan keadilan dan kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu

1.3 Sistematika Penulisan

Laporan kajian feminisasi kemiskinan serta dampak kebiakan, program, dan kegiatan pada kualitas hidup perempuan di Provinsi Bengkulu ini terdiri dari 6 (enam) bab. Bab 1, menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, sistematika penulisan, serta sumber data. Bab 2, menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai konsep feminisasi kemiskinan bab 3, menjelaskan tentang metode penelitian; Bab 4. Menjelaskan profil lokasi kajian; Bab 5 menjelaskan tentang profil feminisasi kemiskinan di bidang pendidikanBab 6, menjelaskan tentang profil feminisasi kemiskinan di bidang ekonomi. Bab 7, menjelaskan tentang kajian feminisasi kemiskinan di bidang kesehatan. Bab 8, menjelaskan tentang kajian feminisasi kemiskinan di bidang politik.Bab 9, menjelaskan tentang kajian feminisasi kemiskinan di bidang sosial; Bab 10 menjelaskan tentang identifikasi dan analisis kebijakan, program, dan kegiatan pada bidangpendidikan,ekonomi, kesehatan, dan politik; Bab 11 menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan Struktural

Terdapat berbagai studi tentang kemiskinan, baik untuk menjawab apa itu kemiskinan maupun faktor penyebabnya. Levitan (1980) dalam Soetrisno (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Ahli lain yaitu Schiller (1979) dalam Soetrisno (2001) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Di kalangan ekonom, kemiskinan sering hanya dilihat sebagai rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena esensi kemiskinan menurut Soetrisno (2001) menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

Jika akar permasalahan ditelusuri, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, juga bukan sekedar persoalan budaya seperti yang ditengarai oleh kaum modernis. Ada persoalan yang lebih jauh mengakar, yaitu kemiskinan terjadi karena ada persoalan struktural yang menyebabkan ketimpangan akses sumber daya ekonomi diantara kelompok masyarakat (ras, etnis, dan gender) yang disebut sebagai kemiskinan struktural (*structural poverty*). Kemiskinan struktural menurut Nasikun dalam Suryawati (2005) yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan namun malah menyuburkan kemiskinan.

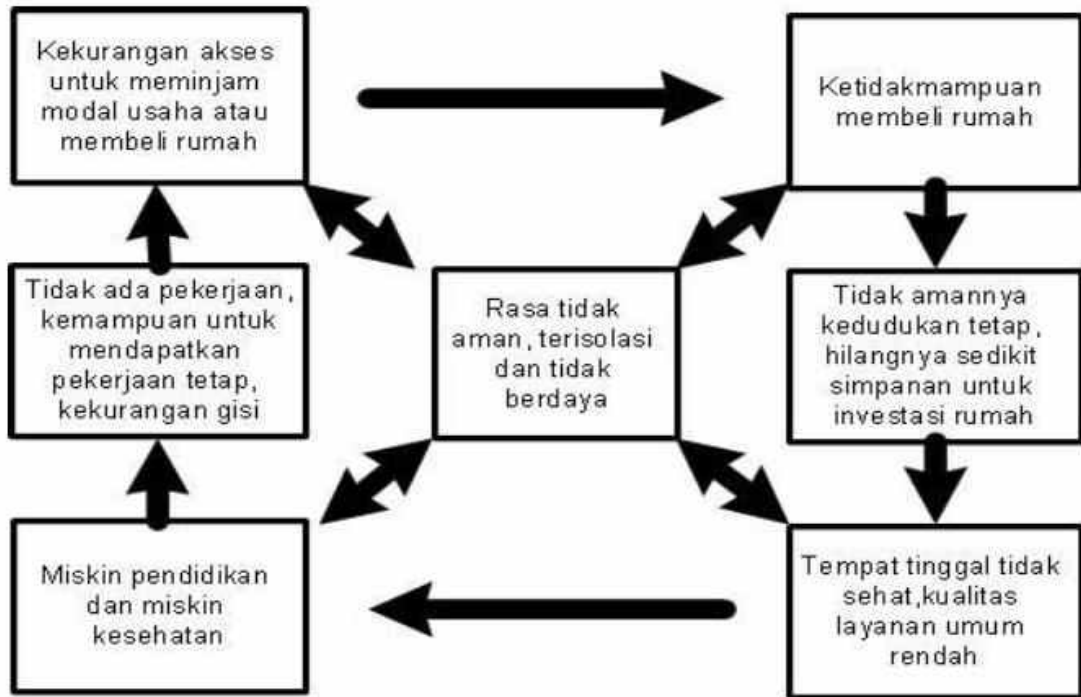
Struktur yang ada didominasi oleh sebagian anggota masyarakat tertentu, sehingga mereka menguasai sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya, sehingga relasi menjadi timpang. Adanya dominasi sebagian anggota kelompok masyarakat terhadap berbagai sarana dan sumber daya memunculkan pemahaman baru, bahwa sesungguhnya persoalan kemiskinan bukan merupakan persoalan ekonomis semata, tetapi juga adanya

kebutuhankebutuhanesensial manusia yang tidakterpenuhi (Jurnal Perempuan, 2005,118-119). Kebutuhan tersebut antarlain meliputi kebutuhan subsistensi,afeksi, keamanan, identitas, proteksi,kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktuluang. Jika kebutuhan-kebutuhan itutidak terpenuhi, maka kondisi dimaksuddapat disebut sebagai kemiskinanmenyeluruh dalam berbagai wajah danbentuknya (kemiskinan multiwajah).

Terdapat definisi spesifik dari kemiskinan terkait penyebabnya. Kemiskinan subsistensiterjadi jika kebutuhan akan sandang pangan papan dan kebutuhan dasarlainnya tidak terpenuhi karena rendahnya pendapatan. Sementara kemiskinanafeksi berwujud pada berbagai bentuk penindasan karena adanya pola hubunganyang eksploitatif antara manusia dengan manusia atau manusia denganalam.Kemiskinan perlindungan terjadi meluasnya budaya kekerasan, sedangkansistem perlindungan atas hak dan kebutuhan masyarakat sangat minim.Selanjutnya, kemiskinan pemahaman diartikan sebagai ketidakmampuanmemenuhi kebutuhan karena kuantitas dan kualitas pendidikan yang rendah.

Kemiskinan partisipasi berupa peminggiran kelompok masyarakat dariproses pengambilan kebijakan karena adanya diskriminasi. Kemiskinan identitasterjadi bila nilai sosio kultural yang ada hancur karena pemaksaan nilai-nilaiasing terhadap budaya lokal. Situasi miskin dimaknai jika: ”tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak mempunyai kebebasan dalam arti luas termasuk bebas dari kecemasan dan rasa takut, bebas dari kelaparan, penyakit, pengangguran, penindasan, bebas bersuara, bebas dari diskriminasi dan kebodohan, bebas memperoleh informasidan lain-lain”.

Menurut Worldbank (2001), terdapat lima dimensi kemiskinan yaitu: (1) kmiskinan pendapatan; (2) kemiskinan kesehatan; (3) kemiskinan pendidikan; (4) kkmiskinan keamanan dan hak pribadi dan; (5) ketidakberdayaan. Kelima dimensi ini akan saling mempengaruhi dan juga mempenaruhi tujuan-tujuan pembangunan. Saling mempengaruhinya kelima dimensi kemiskinan akan memberikan dampak pada setiap individu dari bagian masyarakat. Individu miskin akan meneima akumulasi dari setiap dimensi kemiskinan yang selanjutnya merasa tidak aman, terisolasi dan rasa tidak berdaya (Gambar 1).



Gambar 1 Dampak akumulasi kemiskinan (Worldbank 2001)

2.2 Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki

Pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda dalam kesenjangan dan ketidakberdayaan yang menyebabkan seseorang masuk dalam lingkaran kemiskinan. Konsep feminisasi kemiskinan menggambarkan ketidakadilan dalam soal keterwakilan wanita di antara orang miskin dibandingkan dengan laki-laki (ILO, 2004). Hal ini juga diungkapkan oleh Moghadam (2005) yang mendefinisikan feminisasi kemiskinan sebagai pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Terdapat beragam bentuk kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak, maupun perempuan bersama anak. Menurut ILO (2004) bentuk kemiskinan yang dialami perempuan pada aspek pendidikan, jenis pekerjaan, lapangan kerja, upah, dan keterwakilan politik, yaitu tingkat pendidikan dan yang ditamatkan lebih rendah dibandingkan laki-laki, jumlah pekerja perempuan yang tidak dibayar maupun kerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan laki-laki, upah yang diterima lebih rendah dibandingkan laki-laki, ketenagakerjaan (jumlah pengangguran dan setengah pengangguran) yang lebih tinggi dibandingkan laki-

laki, serta politik (jumlah keterwakilan perempuan pada DPRD tingkat 1 dan 2) lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Bentuk kemiskinan lainnya yang terjadi pada perempuan adalah mengalami kekurangan gizi, pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk layanan sosial lainnya. Perempuan menjadi subyek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka yang meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum.

Adapun karakter perempuan miskin menurut Todaro (2000) yaitu sebagai kepala keluarga, rendah kapasitas untuk menghasilkan pendapatan sendiri, terbatas kontrol pada pendapatan suami, keterbatasan akses pada pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan kerja. Jadi semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi karena perlakuan yang tidak adil, kerja mereka tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan (Shiva 2005).

Chant (2009) mengenai aplikasi dari BPFPA menyatakan bahwa karakteristik feminisasi kemiskinan terlihat dari adanya kepala keluarga perempuan pada rumah tangga miskin, dimana hal ini sejalan dengan ditemukannya anak di luar pernikahan, anak yang lahir tanpa pengakuan dari ayahnya, dan banyaknya bayi yang lahir dari Ibu yang usianya kurang dari 20 tahun. Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang telah termarginalkan dalam sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia. Data Profil Perempuan Indonesia (2011-2015) menyatakan masih lebih tingginya perempuan kepala keluarga yang tidak memiliki ijazah dibandingkan laki-laki. Sejak tahun 2011 hingga 2015 jumlah perempuan kepala keluarga yang tidak mempunyai ijazah terus mengalami penurunan dari 52.02% hingga 46.01%. Hal ini berbeda dengan data pada laki-laki kepala keluarga yang tidak memiliki ijazah yang juga mengalami penurunan pada rentang waktu tersebut dari 22.76% menjadi 19.61%. Jikapun ada perempuan kepala keluarga yang memiliki ijazah adalah sebagai lulusan SD yang sejak tahun 2011-2015 meningkat dari 23.29% menjadi 24.47%.

Jaggar (2013) menyatakan bahwa kehidupan miskin perempuan tidak hanya dicirikan oleh rendahnya pendapatan namun juga kesulitan yang

berhubungan dengan gender mereka, seperti kerentanan secara seksual, marjinalisasi politik, dan beban kerja berlebih. ILO (2004) melihat adanya pengaruh dari ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai akar dari munculnya kemiskinan. Feminisasi kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: 1) Akses perempuan terhadap pekerjaan, 2) akses terhadap upah yang sama, 3) akses pendidikan, dan 4) beban pekerjaan.

Ada pandangan di kalangan ilmuwan sosial bahwa kemiskinan sebenarnya tidak lahir dengan sendirinya dan juga bukan muncul tanpa sebab, tetapi kondisi ini banyak dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi dan politik. Jon Sobrino (1993) menelaah keberadaan orang miskin sebagai rakyat yang tertindas dalam dua perspektif. **Pertama**; pada tataran faktual, kemiskinan pada masyarakat yang sedang berkembang ternyata tidak hanya menyebabkan penderitaan yang tak berkesudahan, melainkan juga kematian manusia sebelum waktunya. Penindasan sistimatis dan konflik bersenjata telah memperburuk situasi mereka yang tertindas. **Kedua**; pada tataran historis-etis, penderitaan kaum miskin dan tertindas itu disebabkan oleh struktur-struktur yang tidak adil baik di tingkat lokal maupun global yang lebih jauh telah menghasilkan kekerasan yang melembaga (*institutionalized violence*) dan korbannya pertama-tama adalah mereka yang miskin (Cahyono, 2005; 9).

Pandangan di atas memperkuat asumsi bahwa pada masyarakat yang budaya patriarkinya masih sangat kental dengan maka penanganan masalah kemiskinan nampaknya memerlukan pendekatan tersendiri yang mungkin berbeda dengan penanganan kemiskinan di daerah yang matrilineal. Pada masyarakat dengan kondisi budaya yang sangat paternalistik, mereka yang berada pada posisi yang tertindas dan lemah akan lebih banyak yang miskin. Mereka ini adalah kaum perempuan, dimana pada masyarakat patrilineal perempuan menduduki posisi subordinat laki-laki, termarjinal dan terdiskriminasi.

Whitehead (dikutip Cahyono dalam JP. 42 2005; 11) telah mendata bahwa lebih dari separo penduduk miskin di negara berkembang adalah kaum perempuan. Data dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang masuk katagori miskin, 70% nya adalah kaum perempuan Hal ini menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan yakni sebuah

kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan dialami oleh kaum perempuan.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan majemuk dalam arti kemiskinan yang terjadi bukan hanya kemiskinan sandang pangan, tetapi juga kemiskinan identitas, informasi, akses, partisipasi dan kontrol. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan Indonesia yang miskin tidak hanya secara ekonomi mereka terkebelakang tetapi juga dalam hal keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, politik, kesehatan dan lain-lain, partisipasi merekapun kurang diberi tempat. Hal ini yang pada gilirannya memunculkan feminisasi kemiskinan di masyarakat Indonesia pada umumnya seperti yang terjadi kemiskinan perempuandi Bali.

Sumber dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan menurut Muhadjir (2005, 166) terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sitem distribusi sumberdaya yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.

Pada dasarnya ada faktor struktural yang menyebabkan individu dalam keluarga dan masyarakat tidak mempunyai akses yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Salah satu hambatan struktural tersebut adalah adanya relasi gender (*gender relation*) yang tidak adil dan setara sebagai akibat dari budaya yang sangat paternalistik.

Selain hal tersebut di atas, struktur budaya patriarkhi juga melahirkan keterbatasan perempuan dalam hal pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dalam keluarga, pengambilan keputusan didominasi oleh kaum laki-laki, demikian juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Di ranah publik, eksistensi perempuan juga kurang diperhitungkan, terbukti dengan

minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dengan demikian maka feminisasi kemiskinan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keterwakilan perempuan dalam kemiskinan sebagai konstruksi sosial dari ketimpangan relasi gender yang dialami perempuan dari laki-laki sehingga berdampak pada keterbelakangan perempuan dalam aspek pendidikan, ketenagakerjaan (ekonomi), akses dalam layanan kesehatan, keterwakilan politik, dan sosial (kekerasan).

2.3 Analisis Gender dalam Program Pembangunan di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Politik

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dapat diambil yaitu dengan mengurangi jumlah perempuan miskin karena dengan mengurangi mereka maka kesejahteraan keluarga akan dapat lebih meningkat dimana perempuan akan lebih banyak membelikan hasil perolehannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan. Di sisi lain pemerintah juga sudah mengarusutamakan gender dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik melalui kebijakan, program, dan kegiatan dari SKPDnya. Hal ini sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Bersama lembaga masyarakat dan swasta, dampak dari kebijakan tersebut berujung pada meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perwujudan keadilan dan kesetaraan gender.

Permendagri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah memberikan makna bahwa hal ini juga sudah berlaku di Provinsi Bengkulu. Sejauhmana pemerintah di daerah ini mampu membuat kebijakan dan program yang sudah mengarusutamakan gender. Hal ini disebabkan program yang dibutuhkan adalah program yang bukan hanya anti kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi namun yang mampu memutus mata rantai tuntutan bekerja di sektor domestik. Oleh karena itu program dan kegiatan pembangunan dari pemerintah maupun pihak lainnya banyak menasar pada penguatan kapasitas perempuan untuk masuk dalam aktivitas ekonomi sehingga berdampak untuk pengurangan kemiskinan dalam arti meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Betapapun hebatnya program yang diberikan oleh pemerintah/pihak lain untuk pemberdayaan ekonomi namun jika masih melanggengkan praktek ketimpangan gender ini maka kemiskinan akan tetap dimiliki oleh perempuan. Analisis gender digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana program dan kegiatan pembangunan mampu merekonstruksi ketimpangan gender dan menyebabkan munculnya perempuan dalam kemiskinan. Pertama adalah analisis gender mengenai indikator Kesetaraan dan keadilan gender yang komponennya adalah Akses, Kontrol, dan Manfaat dari sumberdaya serta Partisipasi dalam lembaga dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Akses merupakan konsep untuk memahami peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumberdaya
- b) Partisipasi yaitu pelibatan atau keterwakilan antara perempuan dan laki-laki dalam program pembangunan
- c) Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan menggunakan sumberdaya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumberdaya tersebut
- d) Manfaat yaitu hasil-hasil dari suatu program pembangunan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki

Sementara itu dalam mengkaji kebijakan dan program menggunakan analisis gender Moser yang melihat sejauhmana pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis perempuan dipenuhi. Kebutuhan praktis merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi segera karena berhubungan dengan hidup yang tidak memuaskan, misalnya kurangnya sumberdaya atau tidak dipenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu kebutuhan strategis peluang dan kekuasaan (akses dan kontrol) terhadap sumberdaya dan kesempatan untuk memilih dan menentukan cara hidup dimana jika dipenuhi dengan maka dapat ikut mewujudkan kesetaraan gender (Moser, 1993).

Selain berdasarkan pemenuhan kebutuhan, maka program atau kegiatan pembangunan juga dianalisis dalam perspektif gender, dimana netral gender merupakan kebijakan/program/kegiatan pembangunan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Sementara itu bias gender melihat bahwa program hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin dan kemudian menjadikan

hal tersebut mendorong adanya ketimpangan gender. Responsif gender sendiri merupakan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Dengan program yang responsif gender ini maka akan mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif. Kajian dilakukan pada berbagai level yaitu pada level makro sebagai pembuat kebijakan ditingkat provinsi dan kota, serta pada level meso dan mikro sebagai penerima program/kegiatan pada tatanan kecamatan dan rumahtangga di desa. Lingkup kajian pada level makro dan meso adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis kebijakan, program, kegiatan SKPD terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan perwujudan keadilan dan kesetaraan gender.
2. Menganalisis data terpilah kemiskinan (profil kemiskinan perempuan)

Kajian pada level mikro yaitu pada level kelurahan dan rumahtangga adalah mengkaji dan menganalisis profil dan proses feminisasi kemiskinan di kalangan perempuan sebagai kepala keluarga/kepala rumahtangga dari golongan miskin dan hampir miskin dari aspek sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik.

Penelusuran data kualitatif selain dilakukan dengan pengumpulan data melalui FGD mengenai program pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu penelusuran data kuantitatif dilakukan dengan melalui pengumpulan data sekunder seperti data profil kemiskinan perempuan yang bersumber dari laporan dinas/instansi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Penelitian akan dilaksanakan dalam waktu tiga bulan yaitu mulai Mei hingga Juli 2016. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan tingginya proporsi kemiskinan yang dialami perempuan kepala keluarga atau perempuan dari keluarga miskin.

3.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan

Metode yang digunakan dalam penentuan responden di masyarakat yaitu *purposive* dimana perempuan kepala keluarga dan perempuan miskin yang dianggap mewakili komunitas desa dan kecamatan. Kelompok ini dapat dikenali sebagai penerima program. Sementara itu informan mengenai program pembangunan yang dijalankan di kabupaten dan provinsi adalah aparat pemerintah dari beragam kedinasan/SKPD bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik seperti dari Provinsi Bengkulu (BPPKB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Bappeda, BPS) serta Kabupaten Bengkulu Tengah (BPPKB, UKM/KOPRASI, Dinas Pertanian, dan PEMDA Bagian KESRA). Kelompok ini akan dilihat sebagai penyusun program.

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan bersifat primer dan sekunder dimana data primer yang diperoleh dari teknik pengambilan data berupa diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis dokumen kebijakan dari instansi terkait di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Diskusi kelompok terarah (FGD) dilakukan empat kali yaitu di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Baik responden maupun informan yang menjadi peserta FGD adalah pihak yang mengetahui tentang praktek akses dan kontrol perempuan dan program/kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik.

Sumber data sekunder utama khususnya yang digunakan untuk Profil feminisasi kemiskinan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik adalah data yang diperoleh dari BPS, yaitu data Survey Angkatan Kerja Nasional tahun 2015, Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2015, Profil Gender dan Anak Provinsi Bengkulu tahun 2015, Provinsi Bengkulu dalam Angka tahun 2015, Bengkulu Tengah dalam Angka tahun 2015, Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu tahun 2015, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu tahun 2015.

Analisis profil feminisasi kemiskinan memetakan situasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik dilakukan pengumpulan data sekunder terpilah jenis kelamin di semua tingkat

pengambilan data, yaitu dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Analisis mengenai feminisasi kemiskinan dari faktor struktur (program dan kegiatan pembangunan) yang melingkupi perempuan akan dibahas mengenai bagaimana program dapat diakses, melibatkan partisipasi warga, mengambil keputusan (kontrol) atas program, dan manfaat dari program. Sementara itu analisis program dan kegiatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial akan dilihat sejauhmana persepektif gender diimplementasikan dan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Beragam analisis tersebut akan ditelaah lebih jauh berdasarkan kelompok penyusun dan penerima program.

3.5 Kerangka Konsep yang digunakan dalam Penelitian

Pengertian Feminisasi kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterwakilan perempuan muncul dalam bentuk kemiskinan yang merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan hasil dari ketimpangan relasi gender yang dialami perempuan dari laki-laki sehingga berdampak pada keterbelakangan perempuan dalam bidang:

- 1) Pendidikan, yaitu dimensi bagi perempuan dapat berpartisipasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan formal melalui lembaga sekolah maupun kemampuan pemahaman (buta huruf)
- 2) Ekonomi, yaitu dimensi bagi perempuan untuk ikut dalam aktivitas produktif dengan terhitung sebagai angkatan kerja yang melekat dengan status maupun jenis pekerjaan di dalamnya
- 3) Kesehatan, yaitu dimensi bagi perempuan untuk dapat hidup berkualitas tanpa keluhan kesehatan; penggunaan jaminan kesehatan; kondisi balita dan imunitasnya, kejadian kawin, hamil, dan melahirkan; dan partisipasi Keluarga Berencana. Berikut
- 4) Politik, yaitu dimensi bagi perempuan untuk dapat berperan dalam ranah publik sebagai pengambil keputusan seperti dalam lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pengurus partai politik
- 5) Sosial yaitu dimensi pada pemenuhan situasi anti diskriminasi termasuk di dalamnya kekerasan pada perempuan dan anak

Kemunculan perempuan dalam kemiskinan ini tidak terlepas dari bagaimana struktur memberikan ruang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Struktur dalam kajian ini diartikan sebagai hadirnya program atau kegiatan pemerintah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan relasi sebagai penyebab feminisme kemiskinan diidentifikasi dalam pemetaan Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima perempuan dari program. Dari sisi program dan kegiatan pembangunan sendiri dilihat dari 1) persepektif gender yang dimilikinya, yaitu netral, bias atau responsif gender maupun 2) kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan.

IV. PROFIL LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu dan Kemiskinan

Provinsi Bengkulu terletak dipesisir barat Pulau Sumatera dan diapit oleh Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara, Provinsi Lampung disebelah selatan, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur,serta Samudera Indonesia di sebelah barat. Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 Kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari 129 kecamatan dan 1524 desa/kelurahan.

Pada tahun 2015, penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebanyak 1.87 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000-2010 sebesar 1.67 persen sedangkan laju pertumbuhan 2010-2015 sebesar 1.71 persen diatas laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1.49 persen untuk tahun 2000-2010 dan 1.38 persen untuk tahun 2010-2015. *Sex ratio* tahun 2015 sebesar 104 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Sebaran penduduk menurut wilayah kabupaten/kota menunjukkan bahwa jumlah penduduk provinsi ini tidak tersebar merata dalam 10 kabupaten/kota dan masih terkonsentrasi di ibukota provinsi. Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi memiliki kepadatan sebesar 2.316 jiwa per km² sedangkan kabupaten dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kabupaten Mukomuko dengan kepadatan 44 jiwa per km². Berdasarkan umur, penduduk Provinsi Bengkulu didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 67.1% dari total penduduk Provinsi Bengkulu. Sebesar 29.1% merupakan penduduk usia muda (0-14 tahun) dan sisanya (3.8%) merupakan penduduk usia lanjut (BPS Bengkulu 2015).

Dikutip dari berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2015, Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada periode September 2014 - Maret 2015 maupun periode Maret 2014 – Maret 2015 mengalami peningkatan. Pada periode September 2014 – Maret 2015 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 17,6 ribu atau meningkat dari 316,50 ribu pada September 2014 menjadi 334,07 ribu pada Maret 2015, sedangkan persentasenya mengalami peningkatan dari 17,09 persen menjadi 17,88 persen. Pada periode Maret 2014 – Maret 2015 penduduk miskin bertambah sebanyak 13,12 ribu jiwa

atau meningkat dari 320,95 ribu pada Maret 2014 menjadi 334,07 ribu pada Maret 2015, sedangkan persentasenya mengalami peningkatan dari 17,48 persen menjadi 17,88 persen.

Jika ditinjau dari wilayah maka jumlah penduduk miskin di perkotaan maupun wilayah pedesaan mengalami peningkatan. Pada daerah perkotaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3,5 ribu sedangkan di daerah pedesaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 14,0 ribu. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga perlu dikaitkan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode September 2014-Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 ini meningkat dari 2,85 pada September 2014 menjadi 3,48 pada Maret 2015, untuk periode Maret 2014 – Maret 2015 juga mengalami peningkatan dari 2,78 pada Maret 2014 menjadi 3,48 pada Maret 2015. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan.

Begitupun Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Periode September 2014 – Maret 2015 naik dari 0,74 menjadi 0,97, sedangkan periode Maret 2014 – Maret 2015 naik dari 0,70 menjadi 0,97. Peningkatan P1 dan P2 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga makin lebar.

4.2. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kemiskinan

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah provinsi Bengkulu. Daerah ini beribukota di Karang Tinggi. Kabupaten Bengkulu tengah berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah utara, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu di sebelah selatan, Kabupaten Kepahiang disebelah

timur, dan Samudera Hindia di sebelah barat. Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 112 desa definitif, 1 kelurahan, dan 30 desa persiapan. Sebagaimana kondisi kependudukan di Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Bengkulu Tengah juga menunjukkan pola piramida penduduk muda, artinya penduduk berusia muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Hal ini berkaitan dengan masih tingginya angka kelahiran dan kecilnya angka kematian bayi dan penduduk usia muda. Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2015 mencapai 107.791 jiwa sedangkan pada tahun 2014 mencapai 106.017 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2015 sebesar 105 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, rasio jenis kelamin tertinggi adalah di Kecamatan Talang Empat dan Pondok Kubang yaitu 109. Sedangkan rasio jenis kelamin dibawah 105 ada di Kecamatan Merigi Sakti dan Pematang Tiga masing-masing 104, 101, dan 102. (BPS Kabupaten Bengkulu Tengah 2016)

4.3. Perempuan Miskin di Bengkulu Tengah

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang di dalamnya dapat terjadi pembagian tugas dan peranan dalam mengakses sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan. Dalam keluarga yang patrilineal, peran laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki posisi yang lebih diutamakan untuk memperoleh akses, memiliki kontrol serta menerima manfaat program pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kepala keluarga di Bengkulu Tengah:

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Bengkulu Tengah

Umur	Jumlah Kepala Keluarga			
	Perempuan		Laki-laki	
	n	%	n	%
5-9	3	0.11	0	0
9-14	3	0.11	1	0.0
15-19	8	0.31	80	0.3
20-24	58	2.22	789	3.3
25-29	112	4.28	2623	10.9

Umur	Jumlah Kepala Keluarga			
	Perempuan		Laki-laki	
	n	%	n	%
30-34	136	5.20	3604	15.0
35-39	196	7.50	3842	16.0
40-44	200	7.65	3264	13.6
45-49	243	9.30	2809	11.7
50-54	316	12.09	2297	9.6
55-59	351	13.43	1881	7.8
60-64	267	10.21	1143	4.8
65+	721	27.58	1691	7.0
Total	2614	100	24024	100

Sumber: Bengkulu Tengah dalam Angka (2014)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kepala keluarga laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Meski begitu nampak adanya perempuan yang menjadi kepala keluarga pada hampir semua kelompok usia dengan jumlah tertinggi pada kelompok usia 65+ (27.58%). Bahkan terdapat 0.11% perempuan yang menjadi kepala keluarga pada umur 5-9 tahun dan 9-14 tahun. Terdapat 9.8% kepala keluarga perempuan/janda di Bengkulu Tengah (Bengkulu Tengah dalam Angka, 2015). Dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 17.88% di provinsi ini maka terjadinya feminisasi kemiskinan besar terjadi di wilayah Bengkulu ini.

V. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Indikator yang digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan data dari 2 sumber, yaitu: Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu (2015) dan BPS Bengkulu (2015). Indikator pendidikan yang digunakan yaitu: 1) Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas berdasarkan status pendidikan; 2) Angka Buta Huruf; 3) Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis; 4) Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk berumur 5-24 tahun; 5) Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk berumur 5-24 tahun; dan 6) Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Berikut ini adalah paparan mengenai kondisi di bidang ekonomi di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah.

A. Provinsi Bengkulu

Tabel 2. Indikator di Bidang Pendidikan Provinsi Bengkulu

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki
1	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas berdasarkan status pendidikan		
	Tidak/belum pernah sekolah	7.78%	4.95%
	SD/MI/Paket A	14.94%	14.54%
	SMP/MTs/Paket B	5.68%	6.14%
	SMA/SMK/MA/Paket C	4.79%	4.62%
	Diploma 1 s.d Universitas	2.40%	4.05%
	Jumlah yang masih sekolah	29.06%	28.11%
	Tidak bersekolah lagi	63.16%	66.94%
2	Angka Buta Huruf	3.73%	1.06%
3	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis		
	Huruf latin	94.53%	98.29%
	Huruf Arab	30.70%	28.57%
	Huruf lain	1.51%	1.86%
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk berumur 5-24 tahun		
	5-6 tahun	33.65%	34.32%
	7-12 tahun	99.81%	99.50%
	13-15 tahun	97.63%	96.09%
	16-18 tahun	79.58%	76.84%

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki
	19-24 tahun	33.84%	23.02%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk berumur 5-24 tahun		
	SD	99.17%	97.08%
	SMP	79.27%	74.68%
	SMA	68.08%	62.07%
	Perguruan Tinggi	31.74%	17.61%
6	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki		
	Tidak punya ijazah	20.30%	14.76%
	SD/MI	24.41%	26.33%
	SMP/MTs	21.68%	23.01%
	SMA/MA	19.96%	21.67%
	SMA/MAK	3.43%	4.95%
	D1/D2/D3	0.79%	0.50%
	D4/S1/2/3	7.23%	7.72%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu 2015

Persentase penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas lebih banyak yang bersekolah di tingkat SD/MI (14.94%) daripada laki-laki (14.54%). Tetapi di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, laki-laki lebih banyak yang bersekolah S2/S3 (4.05%) daripada perempuan (2.40%). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Secara keseluruhan, rata-rata angka partisipasi sekolah (APS) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di semua kelompok umur (BPS Provinsi Bengkulu 2015). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata angka partisipasi murni (APM) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di semua tingkat pendidikan (BPS Provinsi Bengkulu 2015).

Buta huruf adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak dapat baca tulis dapat berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, oleh karenanya perlu dilakukan pemberantasan buta huruf secara menyeluruh, serentah dan terpadu dengan dilandasi semangat gotong royong dari seluruh elemen pemerintah dan

masyarakat (BPS Provinsi Bengkulu 2015). Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa perempuan (3.73%) lebih banyak yang mengalami buta huruf dibandingkan dengan laki-laki (1.06%).

BPS Bengkulu (2015) menyatakan bahwa lama sekolah laki-laki (8.93) juga lebih lama dari perempuan (8.47). Menurut Susenas (2015) dapat membaca dan menulis dapat diartikan sebagai dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji, dll). Persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis huruf latin (94.53%) dan huruf lainnya (1.51%) lebih rendah daripada persentase penduduk laki-laki berumur 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis huruf latin (98.29%) dan huruf lainnya (1.86%). Tetapi perempuan berumur 15 tahun keatas (30.70%) di Provinsi Bengkulu lebih banyak yang mampu membaca dan menulis huruf arab daripada penduduk 15 tahun keatas laki-laki (28.57%). Tingginya jumlah warga yang mampu membaca dan menulis huruf Arab ini dapat menandakan kuatnya nilai keyakinan ajaran Islam sebagai budaya yang mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan dalam bidang reproduksi, produksi, dan sosial.

Sektor pendidikan adalah sektor yang penting diantara indikator kesenjangan gender. Jika dianalisis lebih jauh berdasarkan ijazah/STTB yang dimiliki, ternyata secara keseluruhan persentase penduduk perempuan diatas 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah/STTB lebih sedikit daripada laki-laki hampir disemua tingkat pendidikan.

B. Bengkulu Tengah

Tabel 3. Indikator di Bidang Pendidikan Bengkulu Tengah

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki
1	Angka buta huruf	12.34%	3.94%
2	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis		
	Huruf latin	82.14%	93.77%
	Huruf Arab	40.20%	36.68%
	Huruf lain	0.11%	0.73%
4	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas berdasarkan status pendidikan		
	Tidak/belum pernah sekolah	18.30%	10.42%

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki
	SD/MI/Paket A	17.63%	15.23%
	SMP/MTs/Paket B	6.03%	7.92%
	SMA/SMK/MA/Paket C	4.84%	5.84%
	Diploma 1 s.d Universitas	2.43%	1.73%
	Jumlah yang masih sekolah	30.94%	30.72%
	Tidak bersekolah lagi	50.75%	58.86%
5	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki		
	Tidak punya ijazah	30.50%	24.05%
	SD/MI	26.71%	28.46%
	SMP/Mts	21.98%	23.65%
	SMA/MA	13.51%	15.16%
	SMA/MAK	1.54%	5.11%
	D1/D2/D3	1.19%	0.44%
	D4/S1/2/3	2.89%	3.13%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu 2015

Angka buta huruf perempuan di Bengkulu Tengah (12.34%) jauh lebih tinggi dari angka buta huruf perempuan di Provinsi Bengkulu (3.73%) sekaligus lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka buta huruf laki-laki di Bengkulu Tengah (3.94%). BPS Bengkulu (2015) menyatakan rata-rata lama sekolah perempuan (6.97) lebih rendah daripada laki-laki (8.08). Selisih rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki di Bengkulu Tengah terpaut cukup jauh (± 2 tahun) lebih besar daripada selisih rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Bengkulu (± 0.46 tahun).

Jumlah penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis huruf latin (82.14%) dan huruf lainnya (0.11%) lebih rendah daripada persentase penduduk laki-laki berumur 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis huruf latin (93.77%) dan huruf lainnya (0.73%). Tetapi perempuan berumur 15 tahun keatas (40.20%) di Bengkulu Tengah lebih banyak yang mampu membaca dan menulis huruf arab daripada penduduk 15 tahun keatas laki-laki (36.68%) yang mampu membaca dan menulis huruf arab.

Jumlah penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang tidak sekolah (18.30%) lebih tinggi daripada laki-laki (10.42%). Secara keseluruhan, persentase perempuan berumur 5 tahun ke atas lebih banyak yang bersekolah daripada laki-laki (dilihat dari persentase jumlah perempuan yang masih sekolah dan tidak

bersekolah lagi). Tetapi jika dilihat dari data presentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, secara keseluruhan perempuan lebih sedikit yang memiliki ijazah/STTB daripada laki-laki di semua tingkatan pendidikan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam program di bidang pendidikan terdapat permasalahan dari segi program yang dapat dipengaruhi oleh adanya konstruksi nilai budaya mengenai hak atas pendidikan. Program di bidang pendidikan terlihat masih memunculkan permasalahan terkait biaya pendidikan maupun infrastruktur sekolah yang kurang memadai sehingga partisipasi perempuan dalam memperoleh manfaat di bidang pendidikan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Konstruksi sosial dari nilai patriarki berupa stereotype yang mendahulukan laki-laki dalam mengakses hak pendidikan juga dapat menyebabkan rendahnya perempuan dalam menyelesaikan pendidikannya di SMA sampai dengan Perguruan Tinggi sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi aspek kehidupan perempuan lainnya, seperti ekonomi dan ketengakerjaan, sehingga memunculkan feminisasi kemiskinan.

VI. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG EKONOMI

Indikator yang digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam bidang ekonomi di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan data dari 3 sumber, yaitu: a) Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus 2015; b) Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu (2015); dan c) Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu (2015). Indikator ekonomi yang dilihat dalam kajian ini yaitu: 1) Angkatan kerja, 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); 3) Jumlah penduduk bekerja menurut jam kerja/minggu; 4) Status pekerjaan utama penduduk ; 5) sektor pekerjaan utama penduduk; 6) Tingkat pekerja tidak penuh (Setengah penganggur dan pekerja paruh waktu); 7) Tingkat pengangguran terbuka (TPT); dan 8) Tingkat ketidakaktifan penduduk. Berikut ini adalah paparan mengenai kondisi di bidang ekonomi khususnya ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah.

A. Provinsi Bengkulu

Kontribusi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari aspek ketenagakerjaan. Salah satunya dapat dilihat dari angka angkatan kerja yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja tampak lebih tinggi dibandingkan perempuan (Tabel 4). Data juga memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang paling banyak termasuk angkatan kerja memiliki latar belakang pendidikan SD sementara itu pada angkatan kerja laki-laki paling banyak memiliki pendidikan SMA. Terlihat bahwa angkatan kerja perempuan yang tidak bersekolah danyang memiliki latar belakang pendidikan tamat D1/2/3/universitas lebih banyak daripada angkatan kerja laki-laki, sementara itu jumlah angkatan kerja laki-laki yang tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, dan SMA lebih banyak daripada perempuan. Hal ini berarti bahwa laki-laki dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, dan

SMA lebih memiliki kesempatan untuk diterima dalam beragam bidang pekerjaan yang ada di Provinsi Bengkulu dibandingkan perempuan.

Tabel 4. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang tertinggi di Provinsi Bengkulu

No	Tingkat Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
1	Tidak sekolah	0,02%	0,01%
2	Tidak tamat SD	0,09%	0,11%
3	SD	0,14%	0,22%
4	SMP	0,09%	0,17%
5	SMA	0,13%	0,27%
6	D1/2/3, Universitas	0,10%	0,08%
	Jumlah	0.57	0.86

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus 2015

Data lainnya yang juga terkait dengan angkatan kerja berasal dari Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu (2015) pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dan laki-laki di provinsi ini masih didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SD baik di bulan Februari dan Agustus 2015. Semakin besarnya kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi nampak dari lebih tingginya angkatan kerja perempuan yang memiliki latar belakang Pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki baik di bulan Februari dan Agustus 2015 tersebut.

Tabel 5 Indikator di Bidang Ekonomi terkait Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu

No	Indikator	Februari 2015		Agustus 2015	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	Angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan				
	SD	58.89%	59.50%	59.61%	59.11%
	Menengah	22.77%	29.25%	23.29%	31.37%
	Pendidikan tinggi	18.35%	11.25%	17.10%	9.52%
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)				
	a.TPAK berdasarkan jenis kelamin	59.86%	86.13%	55.78%	85.02%
	b.TPAK berdasarkan usia				
	15-19	21.54%	33.63%	17.78%	32.66%

No	Indikator	Februari 2015		Agustus 2015	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
	25-29	60.93%	91.18%	48.83%	78.82%
	30-34	68.40%	95.99%	63.10%	96.12%
	35-39	72.84%	100%	65.00%	98.08%
	40-44	76.03%	99.39%	71.35%	99.11%
	45-49	78.65%	99.74%	69.85%	99.65%
	50-54	72.75%	100%	69.34%	98.83%
	55-59	68.73%	97.47%	69.51%	98.53%
	60+	42.12%	74.38%	61.34%	96.09%
3	Jumlah penduduk bekerja menurut jam kerja/minggu (%)				
	0	0.88%	2.85%	2.49%	3.21%
	1-14	11.88%	6.19%	8.25%	4.01%
	15-34	32.60%	31.62%	41.69%	27.0%
	35+	54.64%	59.35%	47.57%	65.78%

Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu 2015

Data Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu (2015) juga menyatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Bengkulu lebih rendah daripada laki-laki di semua kelompok umur dan ditemukan jumlah partisipasi perempuan menurun dari 59.86% di bulan Februari 2015 menjadi 55.78% di bulan Agustus 2015. Pada Agustus 2015 ditemukan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja baik perempuan dan laki-laki yang usianya lebih dari 60 tahun hingga 61% dan 96%. Hal ini mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia laki-laki dan perempuan di Provinsi Bengkulu yang masih berkontribusi ekonomi untuk bekerja meski pada usia yang sudah cukup senja tersebut.

Mengacu pada TPAK maka berdasarkan status pekerjaan yang dilakukan, data BPS Bengkulu (2015) menyatakan bahwa lebih banyak perempuan (5.53%) yang tidak dibayar lebih tinggi daripada laki-laki (2.24%). Hal ini juga tampak pada data di Tabel 5 yang menunjukkan jumlah perempuan yang termasuk angkatan kerja yang status pekerjaannya tidak dibayar sebanyak 22.7%. Posisi ini menunjukkan perempuan sebagai pihak yang tersubordinasi dan semakin tidak nampak dalam pembangunan karena mereka mengeluarkan tenaga dan curahan waktu dalam suatu pekerjaan yang bernilai ekonomi namun dianggap hanya membantu dan tidak menerima imbalan atas yang dilakukannya tersebut. Padahal

di sisi lain waktu yang jumlah perempuan yang memiliki curahan waktu untuk bekerja lebih 35 jam per minggu sebanyak 48 persen.

Jika berdasarkan jenis pekerjaan maka terlihat lebih banyak perempuan bekerja di sektor informal (85.93%) dan laki-laki lebih banyak bekerja di sektor formal 65.78% (BPS Bengkulu 2015). Ciri sektor informal adalah bersifat padat karya, kekeluargaan, pendidikan formal rendah, skala kegiatan kecil, tidak ada proteksi pemerintah, keahlian dan keterampilan rendah, mudah dimasuki, tidak stabil, dan tingkat penghasilan rendah. Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa di hampir semua lapangan pekerjaan utama lebih banyak diduduki oleh laki-laki. Khusus pada sektor 6 dan 9 yaitu sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi serta jasa kemasyarakatan lebih banyak didominasi oleh perempuan daripada laki-laki. Kedua jenis pekerjaan tersebut cenderung pada sektor yang bersifat informal.

Tabel 6. Penduduk Bengkulu berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Agustus 2015)

Status pekerjaan utama	Tidak/belum pernah sekolah		Tidak/belum tamat SD		SD		SMP		SMA		D1/2/3/dan Universitas		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Berusaha sendiri	0.1%	0.4%	2.4%	1.1%	4.8%	1.7%	3.8%	1.3%	4.6%	2.1%	0.5%	0.1%	16.3%	6.7%
Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar	0.6%	0.4%	5.2%	1.0%	8.7%	1.6%	4.5%	1.0%	4.4%	1.0%	0.4%	0.1%	23.7%	5.2%
Berusaha dibantu buruh tetap	0.1%	0.0%	0.3%	0.2%	0.7%	0.1%	0.6%	0.2%	1.2%	0.2%	0.4%	0.2%	3.3%	0.9%
Buruh/karyawan	0.1%	0.1%	1.4%	0.5%	2.5%	1.3%	3.1%	0.9%	10.2%	4.1%	5.7%	7.7%	23.0%	14.6%
Pekerja bebas di pertanian	0.1%	0.1%	1.5%	0.7%	1.4%	0.5%	1.1%	0.2%	0.7%	0.2%	0.0%		4.1%	1.8%
Pekerja bebas di non pertanian	0.1%	0.0%	0.5%	0.1%	1.4%	0.3%	1.5%	0.2%	1.6%	0.2%	0.1%		5.1%	0.8%
Pekerja tak dibayar	0.1%	0.6%	0.5%	4.8%	1.7%	7.9%	1.6%	4.9%	1.7%	4.0%	0.2%	0.4%	5.8%	22.7%
Jumlah	1.0%	1.7%	11.0%	8.3%	21.2%	13.3%	16.2%	8.8%	24.5%	11.9%	7.4%	8.5%	81.2%	52.6%

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus 2015

Tingginya jumlah perempuan di Provinsi Bengkulu dalam sektor informal ini dapat disebabkan akibat adanya keterbatasan dalam akses pendidikan yang dimiliki dimana sektor formal biasanya membutuhkan ijazah paling rendah adalah SMA sementara jumlah perempuan di provinsi ini yang memiliki ijazah SD, dan SMA/SMK masih lebih sedikit bila dibandingkan laki-laki (lihat Tabel 2) sehingga beragam jenis pekerjaan sektor formal dapat dimasuki lebih banyak oleh laki-laki. Dengan demikian maka status pekerjaan yang tidak dibayar dan besarnya penghasilan yang cukup rendah pada pekerja perempuan di sektor informal ini menjadi faktor yang mendorong terjadinya feminisasi kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Secara keseluruhan, perempuan di Provinsi Bengkulu sudah nampak dalam aktivitas di sektor ekonomi meski partisipasinya masih lebih rendah bila dibandingkan laki-laki yang tergambar dari status dan jenis yang diperolehnya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan perempuan. Hal ini menunjukkan masih belum nampaknya perempuan dalam pembangunan meskipun sudah memiliki kapasitas pendidikan yang memadai pada perempuan padahal cukup banyak perempuan lulusan pendidikan tinggi yang masuk sebagai angkatan kerja..

Paparan berikut ini adalah mengenai ukuran ketenagakerjaan lainnya di bidang ekonomi namun yang terkait dengan pekerja tidak penuh dan pengangguran. Indikator pekerja tidak penuh berfokus proporsi jumlah jam kerja individu yang kurang dari pekerjaan penuh waktu (*full time*) terhadap total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini pekerja tidak penuh dapat dilihat ke dalam: setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Data BPS Provinsi Bengkulu (2015) dalam Tabel 6 memperlihatkan bahwa jumlah perempuan nampak lebih tinggi sebagai pekerja tidak penuh, baik sebagai setengah penganggur maupun paruh waktunya. Bahkan jumlah perempuan yang masuk ke dalam kategori setengah penganggur meningkat dari Februari ke Agustus 2015.

Tabel 7. Penduduk Provinsi Bengkulu berumur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut golongan umur dan lapangan pekerjaan utama (Agustus 2015)

Golongan Umur	1		2		3		4		5		6		7		8		9		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
15-19	14.1%	3.3%	0.4%	-	2.1%	0.2%	-	-	1.5%	-	4.9%	6.2%	0.2%	0.2%	1.0%	0.2%	1.1%	1.9%	25.2%	11.9%
20-24	30.6%	11.4%	2.8%	-	3.1%	4.0%	0.4%	-	6.6%	0.5%	8.0%	8.0%	4.5%	1.3%	1.8%	2.1%	10.1%	13.8%	67.8%	40.0%
25-29	49.0%	25.2%	2.7%	0.5%	5.4%	0.2%	0.2%	-	5.1%	-	9.7%	12.9%	2.2%	-	6.0%	1.9%	10.3%	17.4%	90.6%	58.2%
30-34	52.2%	30.8%	0.9%	0.5%	3.1%	4.1%	0.3%	0.4%	7.8%	-	13.7%	11.2%	3.3%	-	2.1%	0.4%	16.9%	17.1%	100.4%	63.2%
35-39	59.8%	37.1%	1.9%	0.4%	4.5%	2.3%	0.4%	0.0%	9.0%	-	11.9%	15.2%	5.9%	0.4%	2.7%	0.4%	15.4%	14.3%	111.5%	70.2%
40-44	62.3%	38.1%	0.8%	0.2%	8.1%	2.1%	0.5%	-	11.4%	-	11.9%	13.0%	4.5%	0.6%	0.6%	0.3%	15.5%	14.4%	115.5%	68.7%
45-49	67.0%	39.4%	1.9%	0.1%	3.5%	1.9%	0.1%	-	9.6%	0.1%	10.3%	13.7%	3.2%	-	2.3%	-	17.6%	13.4%	115.5%	68.6%
50-54	70.8%	42.7%	1.8%	0.4%	2.7%	1.0%	-	-	8.0%	-	11.7%	10.9%	7.6%	-	1.1%	0.3%	24.0%	12.8%	127.8%	68.0%
55-59	47.6%	42.0%	0.7%	0.4%	3.1%	2.0%	-	-	5.1%	-	8.5%	6.2%	2.7%	0.5%	-	0.5%	13.5%	8.0%	81.2%	59.6%
60+	29.2%	27.3%	0.2%	0.2%	1.1%	1.4%	-	-	2.0%	-	3.9%	5.7%	0.5%	-	0.2%	-	0.5%	0.7%	37.7%	35.3%
Jumlah	45.1%	27.5%	1.4%	0.3%	3.5%	1.7%	0.2%	0.0%	6.1%	0.1%	9.1%	10.4%	3.1%	0.3%	1.9%	0.7%	10.9%	11.6%	81.2%	52.6%

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus 2015

Keterangan

1. pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi
7. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
8. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

Perempuan bersama laki-laki yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih bersedia menerima pekerjaan tambahan ini lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan SD. Jumlah perempuan yang termasuk pekerja paruh waktu juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki bahkan hingga 100% lebih besar daripada jumlah laki-laki. Bahkan terjadi peningkatan persentase pekerja paruh waktu perempuan dari bulan Februari 2015 (32.31%) ke bulan Agustus 2015 (36.50%).

Hal ini berarti adanya faktor yang menyebabkan perempuan hanya dapat bekerja di bawah jam kerja penuh waktu/ normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, seperti tekanan untuk menjalankan aktivitas reproduktif. Data mengenai lebih banyaknya perempuan yang termasuk pekerja tidak penuh menggambarkan situasi yang menguatkan posisi perempuan tidak nampak dalam pembangunan sehingga tampak lebih ter subordinasi dibandingkan laki-laki.

Tabel 8 Indikator di Bidang Ekonomi terkait Pengangguran di Provinsi Bengkulu

No	Indikator	Februari 2015		Agustus 2015	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	Pekerja Tidak Penuh				
	a. Setengah penganggur				
	✓ Jumlah setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	38.54 %	27.64%	47.11%	29.63%
	✓ Jumlah setengah penganggur menurut tingkat pendidikan				
	SD	64.20%	63.19%	68.45%	67.37%
	Menengah	20.16%	26.30%	19.86%	26.24%
	Pendidikan tinggi	15.64%	10.50%	15.64%	11.69%
	b. Tingkat pekerja paruh waktu	32.31%	16.0%	36.50%	18.26%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	Tingkat pengangguran terbuka	19.78%	7.35%	22.14%	16.56%
	TPT menurut tingkat pendidikan				
	SD	0.92%	0.98%	3.18%	1.73%
	Menengah	7.13%	3.06%	8.24%	8.29%
	Pendidikan tinggi	14.4%	5.85%	10.73%	8.56%
3	Tingkat	40.14%	13.87%	44.22%	14.98%

No	Indikator	Februari 2015		Agustus 2015	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
	ketidakaktifan penduduk lebih dari 15 tahun				

Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu 2015

Konsep berikutnya untuk melihat kontribusi perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). BPS Provinsi Bengkulu (2015) menyatakan pada Agustus 2015 ini jumlah penganggur terbuka lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki baik yang memiliki latar belakang pendidikan SD, menengah, dan pendidikan tinggi.

Tingkat ketidakaktifan merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Dengan lebih tingginya TPAK laki-laki maka Tingkat ketidakaktifan penduduk pun lebih tinggi pada perempuan baik pada Februari maupun Agustus 2015.

Data mengenai ketenagakerjaan ini menunjukkan masih lemahnya perempuan baik yang tidak maupun memiliki latar belakang pendidikan hingga pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan cara yang dapat ditempuh seseorang untuk hidup lebih baik dengan pekerjaan yang dilakukannya. Namun perempuan di Provinsi Bengkulu ini meskipun sudah memiliki latar belakang hingga pendidikan tinggi namun masih banyak yang belum memiliki jam kerja normal dan masih banyak yang terserap dalam sektor pekerjaan utama yang bersifat informal. Hal ini menunjukkan masih perlunya dinas pemerintah dan masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap penduduk perempuan, khususnya pada perempuan yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi yang masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

B. Bengkulu Tengah

Jumlah penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja di Bengkulu Tengah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jumlah perempuan yang termasuk angkatan kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan tamat SD,

SMP, dan SMA berjumlah lebih sedikit daripada laki-laki. Hal berbeda terjadi dimana jumlah perempuan dengan latar belakang tidak sekolah atau memiliki latar pendidikan D1/2/3 universitas lebih banyak bila dibandingkan laki-laki. Kecenderungan ini sama dengan yang terjadi di Provinsi Bengkulu sehingga nampak bahwa kebanyakan pekerjaan ini yang membutuhkan latar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA cenderung lebih banyak memberikan akses pada laki-laki dibandingkan perempuan. Bahkan perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi hanya terserap 6% sebagai angkatan kerja.

Tabel 9. Penduduk Bengkulu Tengah berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dan pendidikan tertinggi

No	Indikator	Perempuan	Laki-laki
1	Tidak sekolah	14,2%	2,6%
2	Tidak tamat SD	20,5%	15,0%
3	SD	25,7%	31,2%
4	SMP	18,5%	21,5%
5	SMA	15,1%	27,5%
6	D1/2/3. Universitas	6,0%	2,3%

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Bengkulu Agustus (2015)

Kecenderungan TPAK perempuan di Bengkulu Tengah yang lebih rendah daripada TPAK laki-laki juga sama dengan yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Berdasar data pada Tabel 10 ditemui jumlah penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Bengkulu Tengah yang diukur sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) lebih sedikit dibandingkan laki-laki baik pada bulan Agustus 2014 dan 2015.

Tabel 10. Indikator Bidang Ekonomi di Bengkulu Tengah

No	Indikator	Agustus 2014		Agustus 2015	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	46.75%	84.82%	46.56%	86.31%
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	6.50%	4.05%	5.88%	6.02%
3	Tingkat ketidakaktifan	53.25%	15.18%	53.44%	13.69%

Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja Bengkulu (2015)

Meski begitu tampak dari data BPS Bengkulu (2015) bahwa perempuan sebanyak 7.84% bekerja pada kategori Pekerja yang tidak dibayar dan hal ini lebih tinggi bila dibandingkan laki-laki. Hal ini merupakan gambaran dari posisi perempuan saat ini yang juga selain bekerja namun tidak dinilai sebagai bekerja sehingga menggambarkan adanya subordinasi pada perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Jumlah perempuan juga lebih sedikit yang bekerja di sektor formal (24.24%) dan informal (39.12%) bila dibandingkan laki-laki (75.76% dan 60.88%). Tekanan untuk terus melakukan aktivitas dalam ranah domestik dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk banyak berkontribusi dalam aktivitas ekonomi dengan lebih banyak bekerja di sektor informal. Padahal sektor ini tidak banyak memberikan banyak pendapatan sehingga feminisasi kemiskinan dapat terjadi akibat posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam aktivitas ekonomi ini.

Bagi perempuan yang sudah bekerja masih menghadapi kemungkinan tetap bertanggungjawab dalam mengelola aktivitas reproduktif dalam rumahtangganya sehingga dapat menimbulkan beban kerja bagi perempuan dan bagi perempuan yang lebih memilih peranannya berdasar konstruksi sosial tersebut dengan kembali lagi pada aktivitas domestik maka menjadikan perempuan sebagai pihak yang termarjinalkan akibat aktivitas ekonomi. Hal ini dapat mendorong munculnya feminisasi kemiskinan khususnya perempuan yang tidak memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan maupun menjadi kepala keluarga perempuan.

VII. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG KESEHATAN

Indikator yang digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan data dari 4 sumber, yaitu: a) Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu (2015); b) Dinkes Bengkulu (2014); c) Profil Gender dan anak Bengkulu (2014); dan d) Seksi KIA (Hasil Pemutakhiran 2015). Indikator kesehatan yang dilihat dalam kajian ini yaitu: 1) Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan; 2) Penduduk dan penggunaan jaminan kesehatan; 3) Balita, imunisasi, dan ASI; 4) Persentase perempuan berumur 10 tahun yang pernah kawin dan hamil; 5) Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan penolong proses kelahiran; 6) Angka Kematian Ibu; 7) Cakupan pelayanan ketika pemberian imunisasi TT2+ dan suplementasi Fe3; dan 8) Angka partisipasi Keluarga Berencana. Berikut ini adalah paparan mengenai kondisi di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah.

A. Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu (2015) jumlah penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dan sakit sebulan terakhir lebih banyak dibandingkan laki-laki (lihat Tabel 11). Meskipun begitu jumlah penduduk laki-laki yang mengalami sakit parah lebih banyak dialami dibandingkan perempuan. Dalam upaya memperoleh layanan kesehatan, jumlah perempuan tampak lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap dan berobat selama sebulan terakhir dibandingkan laki-laki.

Tabel 11. Indikator di Bidang Kesehatan di Provinsi Bengkulu (1)

No	Indikator	Perempuan	Laki-laki
1	Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan		
	a. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir	28.63%	27.32%

No	Indikator	Perempuan	Laki-laki
	b. Persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir	15.54%	15.33%
	c. Persentase penduduk yang sakit parah	23.19%	25.31%
2	Penduduk dan penggunaan jaminan kesehatan		
	a. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebulan terakhir	29.16%	28.41%
	b. Persentase penduduk yang pernah rawat inap setahun terakhir	3.78%	2.84%
	c. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap	62.70%	62.15%
3	Persentase perempuan berumur 10 tahun yang pernah kawin dan hamil		
	a. Persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut umur perkawinan pertama		
	<16 tahun	9.95%	
	17-18 tahun	20.01%	
	19-20 tahun	41.76%	
	>21 tahun	28.28%	
	b. Persentase perempuan yang pernah hamil berumur 10 tahun ke atas menurut umur perkawinan pertama		
	<16 tahun	13.80%	
	17-18 tahun	22.45%	
	19-20 tahun	26.64%	
	>21 tahun	37.11%	
4	Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan penolong proses kelahiran		
	Dokter kandungan	23.80%	
	Dokter umum	0.76%	
	Bidan	69.46%	
	Perawat	0.81%	
	Tenaga kesehatan lainnya	0.09%	
	Dukun beranak/paraji	4.92%	
	Lainnya	0.03%	
5	Balita, imunisasi, dan ASI		
	a. Persentase balita yang mempunyai kartu imunisasi		
	Punya. Ditunjukkan	50.29%	53.02%
	Punya. tidak ditunjukkan	41.59%	40.51%
	Tidak punya	8.13%	6.47%
	b. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap	28.82%	28.90%
	c. Persentase anak kurang dari dua tahun yang pernah diberi ASI	98.38%	96.01%
	d. Persentase anak kurang dari dua tahun yang masih diberi ASI	86.05%	83.52%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu (2015)

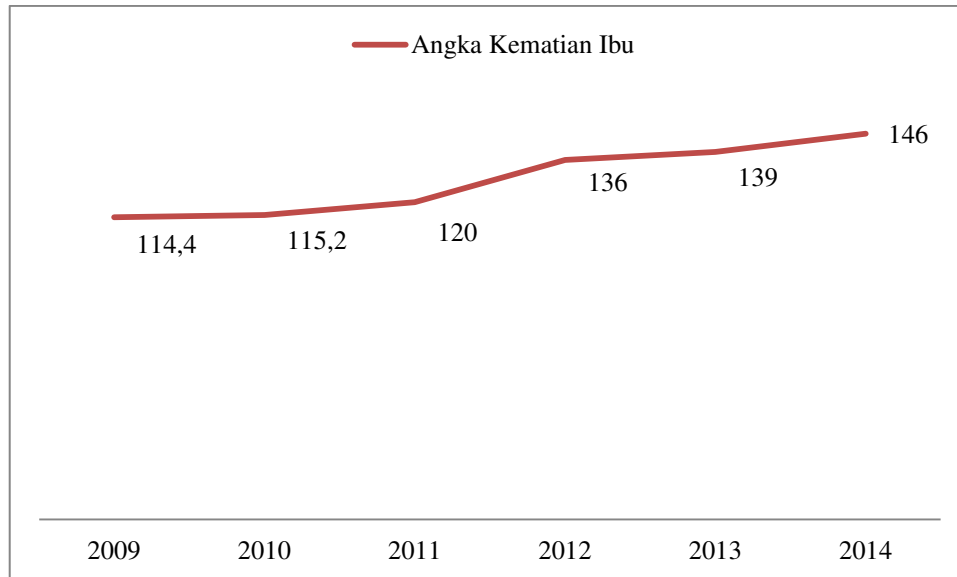
Upaya menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas sudah diatur dengan adanya kebijakan pemerintah UU Perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa tentang usia paling muda untuk menikah yang diizinkan oleh UU adalah usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dengan izin orangtua. Namun secara kebijakan UU ini bertentangan dengan UU perlindungan anak pasal 26 ayat 1c tahun 2002 yang mengharuskan orangtua mencegah perkawinan usia anak (dibawah 18 tahun). Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu (2015) pada Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Provinsi Bengkulu menikah pada usia 19-20 tahun (41.76%) namun masih ada perempuan yang menikah saat berumur 17-18 tahun (20.01%) dan kurang dari 16 tahun (9.95%). Bahkan Bengkulu menempati urutan kelima terbesar kasus nikah muda di Indonesia setelah Kalsel, Jabar, Kaltim, dan Kalteng (Bengkulu Ekspres, 2013).

Pernikahan muda ini dapat disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi dimana menurut LPPM Universitas Bengkulu dalam Radar Bengkulu Online (2016) hal ini dapat disebabkan oleh lingkungan yang lazim menikah diusia belasan, sudah ada yang melamar, pacaran sudah lama, gaya hidup, sikap permisif terhadap hubungan lawan jenis, hamil di luar nikah, faktor orangtua (menimang cucu, taat agama, membagi beban ekonomi dengan menantu laki-laki). Hal lain yang perlu dicermati adalah perempuan yang menikah pada saat usia kurang dari 16 tahun ini secara biologis masih kurangiap jika terjadi kehamilan maupun penyesuaian dalam rumahtangga.

Dengan kondisi demikian maka kehamilan pertama perempuan di Provinsi Bengkulu pun sebagian besar terjadi pada usia lebih dari 21 tahun (37.11%), tetapi masih terdapat 13.80% yang hamil pertama pada usia kurang dari 16 tahun dan 17-18 tahun atau masih usia sekolah. Jika sudah terjadi kehamilan pada anak perempuan yang masih sekolah maka selanjutnya pemenuhan hak pendidikan anak tersebut menjadi tidak terpenuhi karena sekolah akan memberikan keputusan untuk mengeluarkan dari sekolah. Padahal pasal 32 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali para siswi yang tengah mengandung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyatakan tidak sepakat dengan adanya

pelarangan bagi siswa hamil ikut ujian dan menganggapnya sebagai diskriminasi. Data tidak banyak menunjukkan bahwa hal ini terjadi pada anak laki-laki yang menikah muda atau menghamili saat masih sekolah. Dengan demikian maka diperlukan mekanisme penyusunan pendidikan pada anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atau hamil saat sekolah agar tetap dapat menikmati kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan. Dampak pada perempuan yang sekolah lalu dikeluarkan akibat hamil merupakan bentuk ketidakadilan gender berupa subordinasi. Dampak ini sangat mengancam kehidupan perempuan selanjutnya sehingga jika tidak dikelola ia dapat termasuk miskin dan menambah kejadian feminisasi kemiskinan.

Data pada Tabel 11 juga menunjukkan sebagian besar perempuan mendapatkan pertolongan persalinan dari bidan (69.46%) dan dokter (23.80%) meski masih ditemui adanya 4.92% proses melahirkan yang ditolong oleh dukun/paraji setempat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mempercayakan tenaga kesehatan dalam membantu proses kelahiran dimana hal ini sesuai dengan data Dinas Kesehatan Bengkulu (2014) yang menyatakan 94% persalinan oleh tenaga kesehatan. Sayangnya Angka Kematian Ibu (AKI) di Bengkulu pada tahun 2014 merupakan mengalami peningkatan sejak tahun 2009, dimana AKI tahun 2014 sebesar 146 per 100.000 kelahiran hidup yang terdiri dari 49 orang yaitu kematian saat hamil (4 orang), saat bersalin (26 orang), dan saat nifas (19 orang) dan meningkat dari tahun 2013 (139 per 100.000 kelahiran hidup). Data Target penurunan AKI Provinsi Bengkulu tahun 2015 ini belum mencapai target Nasional yang sebesar 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.



Gambar 2. AKI setiap 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014

Peningkatan AKI dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyak faktor seperti jumlah anak yang dilahirkan, jarak kelahiran, serta tenaga penolong kelahiran yang dapat meningkatkan AKI. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi perempuan adalah peningkatan status gizi, kondisi kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan kebijakan pemerintah untuk membatasi kelahiran mengatur jarak kelahiran serta kualitas dan kuantitas tenaga penolong persalinan, kunjungan pemeriksaan ibu hamil (K1/K4), hingga program Jampersal (Jaminan Persalinan).

Beberapa data menunjukkan adanya upaya untuk menurunkan AKI tersebut dimana salah satunya adalah sudah lebih dari 90% ibu hamil yang melakukan kunjungan untuk memeriksakan kandungannya dengan melakukan ANC (Seksi KIA, Hasil Pemutakhiran 2015). Namun ditemukan adanya penurunan dari jumlah ibu hamil yang terdata pada Kunjungan 1 (K1) yaitu sebanyak (96%) dan menurun jumlahnya pada Kunjungan ke 4 (K4) yaitu sebanyak 89%. Padahal kunjungan selama kehamilan akan menjadikan kandungan ibu hamil menjadi lebih terpantau oleh pelayan kesehatan dan memperoleh akses kesehatan dari adanya program pemberian imunisasi dan tablet sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas janin.

Upaya perlindungan perempuan untuk mengurangi AKI tersebut bertujuan untuk menghasilkan bayi laki-laki dan perempuan yang sehat. Hak kesehatan dasar pada bayi atau balita adalah memperoleh kecukupan layanan medis yang mendukung pertumbuhan janin selama dalam kandungan maupun imunisasi lengkap ketika lahir. Terkait hal tersebut maka salah satu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan atau bayi adalah pemberian imunisasi TT2+ dan pemberian tablet Fe kepada ibu hamil. Hasil analisis data Profil Gender dan Anak tahun 2014 menunjukkan hanya 64% ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT2+. Tablet Fe merupakan zat besi berupa Fe1, Fe2 dan Fe3 yang dapat mempengaruhi kesehatan janin dalam kandungan. Upaya pelayanan kesehatan pemberian tablet Fe kepada ibu hamil di Provinsi Bengkulu berdasarkan Profil Kesehatan tahun (2013) ada 91% ibu hamil yang mendapatkan Fe3.

Imunisasi dasar merupakan hak kesehatan dasar anak. Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu (2015) pada Tabel 10 menunjukkan bahwa orangtua sudah cukup memberikan perhatian pada kesehatan anak dengan memiliki kartu imunisasi dimana lebih banyak dimiliki dan ditunjukkan untuk anak laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Balita perempuan lebih banyak yang tidak memiliki kartu imunisasi dan yang mengaku memiliki kartu imunisasi tetapi tidak ditunjukkan. Kartu imunisasi menjadi alat monitoring bagi pihak kesehatan dan orangtua untuk mengetahui kelengkapan imunisasi yang sudah diterima oleh anak. Namun jumlah balita perempuan yang diberikan imunisasi lengkap lebih sedikit daripada balita laki-laki dengan selisih 0.09%. Imunisasi dapat menjadikan kualitas kesehatan anak lebih baik ke depannya dengan terhindar dari penyakit seperti campak dan polio. Hal ini dapat menunjukkan pemenuhan kesehatan berupa imunisasi lengkap lebih rendah pada anak perempuan dibandingkan laki-laki.

Terkait dengan pemenuhan hak kesehatan lainnya pada anak yaitu ASI yang merupakan sumber kesehatan bagi bayi dan balita hingga dua tahun, didapati data bahwa lebih dari 90% bayi dan balita tersebut sudah dan masih diberi ASI hingga dua tahun (Tabel 11). Data juga menunjukkan bahwa jumlah balita perempuan yang usianya kurang dari dua tahun tampak lebih banyak yang pernah

diberi ASI dan masih diberi ASI dibandingkan balita laki-laki kurang dari dua tahun. Hal ini menunjukkan kesadaran bagi orangtua di provinsi untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan dengan memberikan ASI pada bayi kurang dari dua tahun baik perempuan maupun laki-laki.

Meski anak banyak diartikan sebagai pintu rezeki namun sudah ada program pemerintah untuk mengendalikan populasi penduduk. Hal ini sesuai Undang Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dalam pembangunan keluarga sejahtera dinyatakan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang kecil, bahagia dan sejahtera. Program Keluarga Berencana sesungguhnya tidak hanya berfungsi untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup.

Angka partisipasi Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu masih di dominasi oleh kaum perempuan. Fenomena ini disebabkan oleh pandangan patriarkhis tentang seksualitas dan reproduksi, yang menempatkan peran sosial dan kultural perempuan sebagai “mesin” produksi anak dan generasi. Dengan demikian, maka perempuan dianggap yang bertanggungjawab akan pengaturan kehamilan, serta rahim perempuan diatur oleh negara dalam hal kontrol pertumbuhan penduduk. Dari alat kontrasepsi yang diciptakan pun lebih banyak kontrasepsi untuk perempuan, antara lain IUD, WOW, implant, suntik, dan pil. Sementara kontrasepsi untuk laki-laki hanya MOP dan kondom. Dari ke lima alat kontrasepsi untuk perempuan tersebut, yang paling banyak digunakan adalah suntik dan pil. Data Seksi KIA (Hasil Pemutakhiran 2015) menunjukkan bahwa sebanyak 91.73% dari total pengguna KB di Bengkulu adalah perempuan. Hal ini juga menandakan adanya subordinasi perempuan atas praktek penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah yang lebih dikonstruksi untuk perempuan.

Pelayanan kesehatan juga diberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut. Sebanyak 82 158 penduduk usia lanjut sebanyak 36.155 penduduk

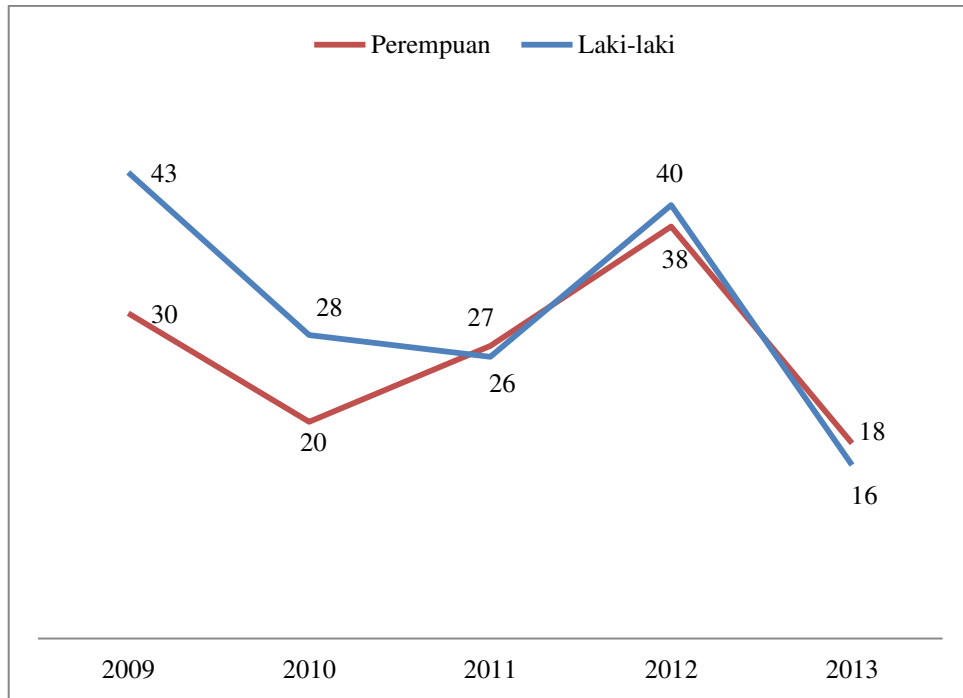
usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan atau sebesar 44.01 % (Lihat Tabel 12). Berdasarkan data ternyata penduduk usia lanjut perempuan lebih banyak mendapatkan pelayanan kesehatan (51.55%) dibandingkan penduduk usia lanjut laki-laki (31.57%). Hal ini merupakan bentuk dukungan yang baik dari pemerintah dimana kualitas hidup manusia. Dukungan untuk lansia perempuan dan laki-laki ini ditujukan agar hidupnya menjadi lebih berkualitas.

Tabel 12. Indikator di Bidang Kesehatan di Provinsi Bengkulu (2)

No	Indikator	Perempuan	Laki-laki
1	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	51.55%	31.57%
2	Penyakit yang diderita penduduk		
	Penyakit menular seksual	HIV : 55.64% AIDS :55.47% Syphilis :80%	HIV : 44.36% AIDS : 44.53% Syphilis :20%
	Penyakit tidak menular	Tekanan darah tinggi : 25.29%	Tekanan darah tinggi : 15.71%

Sumber: Profil Gender dan anak Bengkulu 2014

Di Provinsi Bengkulu HIV/AIDS juga telah menyebar dan menunjukkan angka yang cukup tinggi walaupun datanya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari jenis kelamin ternyata perempuan (HIV: 55.64% ; AIDS: 55.47%) masih lebih banyak yang menderita HIV/AIDS dibandingkan laki-laki walaupun selisihnya sedikit. Data yang fluktuatif pada Tabel 12 menunjukkan fenomena gunung es yang terjadi pada jumlah kasus HIV /AIDS. di mana hanya sedikit orang yang melaporkan. Sementara begitu banyak kasus penyebaran yang tidak teridentifikasi. Di samping ada persoalan “penyembunyian” data untuk masalah reputasi Pemerintah Daerah. kasus HIV/AIDS juga berkaitan dengan stigma. Kuatnya stigma mengalahkan kebutuhan untuk mendapat perawatan medis.



Gambar 3. Jumlah Penderita HIV/AIDS di Bengkulu Tahun 2009-2013

Semakin berkembangnya ekonomi di provinsi ini ikut mempengaruhi pengaruh modernisasi dalam beragam dinamika kehidupan sosial, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu penyakit yang muncul akibat penyakit menular seksual adalah terinfeksi virus HIV, AIDS dan Sifilis. Data pada Tabel 12 menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu jumlah penderita penyakit HIV/AIDS juga telah menyebar dan menunjukkan bahwa jumlah perempuan masih lebih banyak yang menderita HIV/AIDS maupun Sifilis dibandingkan laki-laki. Perkembangan jumlah penderita penyakit ini sejak tahun 2009 disajikan pada Gambar 2 yang menggambarkan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 penderita HIV/AIDS penderita perempuan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan meningkat lagi di tahun 2012 namun menurun lagi pada tahun 2013. Perempuan yang menderita penyakit ini dapat ditularkan dari suaminya dalam perilaku seksual sehingga perempuan menjadi rentan terkena.

Data yang fluktuatif itu disebabkan adanya fenomena gunung es yang terjadi pada jumlah kasus HIV/AIDS karena dapat berbasis pelaporan namun pada faktanya masih berpotensi adanya penduduk yang belum teridentifikasi. Di samping itu adanya potensi persoalan “penyembunyian” data ini karena terkait reputasi Pemerintah Daerah. Kasus HIV/AIDS juga berkaitan dengan stigma yang

dapat mengalahkan kebutuhan untuk mendapat perawatan medis. Kondisi lebih banyaknya perempuan yang terkena penyakit menular seksual ini dapat menunjukkan isu kekerasan akibat tertularnya penyakit yang tidak dikehendaknya karena tertular dari suaminya.

Program KB yang merupakan program dari Kabupaten dan desa tampak diakses, diikuti, dan menerima manfaat oleh bersama (laki-laki dan perempuan) meskipun laki-laki yang muncul menjadi pihak yang menentukan kontrol dalam program ini. Sementara itu untuk program di bidang kesehatan di kecamatan/desa sudah dapat diakses oleh bersama (laki-laki dan perempuan) meski banyak juga perempuan yang berpartisipasi dan memiliki kontrol yang khas dari perempuan pada program di bidang kesehatan ini. Stereotype mengenai perempuan adalah penjaga keluarga (suami dan anak) sehingga dapat bekerja di sektor publik bidang kesehatan. Dengan demikian maka perempuan banyak yang bekerja di lingkup sosial sebagai tenaga kesehatan (kader Posyandu atau Posbindu) ini. Padahal kerja ini tidak banyak menghasilkan penghasilan di balik kerja yang harus perempuan lakukan. Bahkan untuk program seperti KB malah laki-laki yang memiliki kontrol.

B. Bengkulu Tengah

Data mengenai kondisi kesehatan ini yang dapat dilihat pada Tabel 13 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan terakhir lebih banyak dibanding laki-laki namun jumlah penduduk laki-laki yang menderita sakit parah dan rawat inap lebih banyak dibandingkan perempuan. Dalam upaya memperoleh layanan kesehatan yang sudah dijamin oleh pemerintah, jumlah perempuan tampak lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan sementara laki-laki lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap dibandingkan perempuan. Besarnya jumlah penduduk perempuan di kabupaten ini dalam menggunakan jaminan untuk rawat jalan menunjukkan bahwa penyakit yang mereka alami masih dapat diakomodir dengan rawat jalan tampaknya agar mereka dapat melakukan peran-perannya dalam ranah domestik, produktif, dan sosial.

Sama halnya dengan di Bengkulu, sebagian besar perempuan di Bengkulu Tengah menikah pertama pada usia 19-20 tahun (44.24%) dan masih ditemui perempuan yang menikah umur kurang dari 16 tahun (14.20%) dan umur 17-18 tahun (20.99%). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang menikah pada usia dini yaitu kurang dari 17 tahun padahal batas usia paling muda untuk menikah menurut UU Perkawinan yaitu 17 tahun.

Sebagian besar perempuan di Bengkulu Tengah mengalami kehamilan pertama pada usia >21 tahun. Tetapi masih terdapat perempuan yang mengalami kehamilan pertama pada usia <16 tahun (19.88%). Sama halnya dengan di Provinsi Bengkulu. sebagian besar perempuan mendapatkan pertolongan persalinan dari bidan (63.0%) dan dokter (20.52%) tetapi masih terdapat sekitar 16.48% yang melahirkan ditolong oleh dukun/ paraji setempat.

Tabel 13. Indikator di Bidang Kesehatan di Bengkulu Tengah

No	Indikator	Perempuan	Laki-laki
1	Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan		
	a. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir	29.92%	27.81%
	b. Persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir	14.61%	15.09%
	c. Persentase penduduk yang sakit parah	23.75%	28.43%
2	Penduduk dan penggunaan jaminan kesehatan		
	a. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebulan terakhir	31.34%	29.04%
	b. Persentase penduduk yang pernah rawat inap setahun terakhir	1.62%	2.19%
	c. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap	70.58%	73.36%
3	Balita, imunisasi, dan ASI		
	a. Persentase balita yang mempunyai kartu imunisasi	39.78%	29.66%
	Punya. tidak ditunjukkan	54.50%	67.32%
	Tidak punya	5.72%	3.01%
	b. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap	31.75%	35.79%
c. Persentase anak kurang dari dua tahun	96.38%	97.59%	

No	Indikator	Perempuan	Laki-laki
	yang pernah diberi ASI		
	d. Persentase anak kurang dari dua tahun yang masih diberi ASI	74.49%	99.38%
4	Persentase perempuan berumur 10 tahun yang pernah kawin dan hamil		
	a. Persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut umur perkawinan pertama		
	<16 tahun	b. 14.20%	c.
	17-18 tahun	d. 20.99%	e.
	19-20 tahun	f. 44.24%	g.
	>21 tahun	h. 41.55%	i.
	a. Persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut kehamilan pertama		
	<16 tahun	19.88%	
	17-18 tahun	26.96%	
	19-20 tahun	25.42%	
	>21 tahun	27.74%	
5	Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan penolong proses kelahiran		
	Dokter kandungan	20.52%	
	Dokter umum	0.00%	
	Bidan	63.0%	
	Perawat	0.00%	
	Tenaga kesehatan lainnya	0.00%	
	Dukun beranak/paraji	16.48%	
	Lainnya	0.00%	

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Bengkulu 2015

Dinkes Bengkulu (2014) menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Bengkulu Tengah (2 orang) saat persalinan dimana hal ini jumlahnya lebih sedikit daripada AKI di Provinsi Bengkulu (49 orang). Untuk kunjungan ANC K1 ibu hamil di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah sebesar 96%. Tetapi terdapat penurunan kunjungan pada ANC K4 ibu hamil baik di Provinsi Bengkulu (89%) maupun di Bengkulu Tengah (90%). Secara keseluruhan ANC K1 hingga K4 ibu hamil lebih baik di Bengkulu Tengah daripada di Provinsi Bengkulu. Cakupan kelahiran ditolong oleh tenaga profesional antara di Bengkulu dan Bengkulu Tengah sudah mencapai 94% (sudah baik).

Cakupan pemberian imunisasi TT2+ dan suplementasi Fe3 pada perempuan di Bengkulu Tengah juga tidak jauh berbeda dengan cakupan pemberian imunisasi TT2+ dan suplementasi Fe3 pada perempuan di Bengkulu. Hanya 64% ibu hamil di Bengkulu Tengah yang mendapatkan imunisasi TT2+

(sama dengan cakupan pemberian imunisasi TT2+ perempuan di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan). Sebanyak 97% ibu hamil telah mendapatkan suplementasi Fe3. lebih banyak dari ibu hamil yang mendapatkan suplementasi Fe3 di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan (91%).

Hampir sama dengan pengguna KB di Provinsi Bengkulu, hampir sebagian besar pengguna KB di Bengkulu Tengah adalah perempuan (93.03%). Hasil analisis data Bengkulu Tengah dalam Angka (2014) menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 25.1% pasangan usia subur yang belum menggunakan KB. Balita perempuan lebih banyak yang memiliki kartu imunisasi dan ditunjukkan daripada balita laki-laki. Jumlah balita laki laki yang mendapatkan imunisasi. yang pernah mendapatkan ASI dan yang sedang mendapatkan ASI lebih banyak daripada balita perempuan.

VIII. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG POLITIK

Kesempatan untuk bekerja di sektor publik dalam lembaga pemerintahan mulai banyak diisi oleh perempuan di provinsi ini. Dengan demikian maka perempuan dapat menduduki jabatan strategis sehingga dapat berperan sebagai pengambilan keputusan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Indikator yang digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan di Provinsi Bengkulu ini berdasarkan data dari 4 sumber, yaitu: a) Statistik Daerah Bengkulu (2016); b) Biro Pemerintahan Setda Bengkulu (2014); c) Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu (2014); d) BPMPD Provinsi Bengkulu (2014); dan e) Profil Gender dan anak Bengkulu (2014). Indikator politik yang dilihat dalam kajian ini yaitu: 1) Keterwakilan dalam lembaga pemerintahan (legislatif, yudikatif, dan eksekutif); dan 2) Jumlah kepala desa dan parat pemerintahan serta 3) keanggotaan dalam kepengurusan koperasi. Berikut ini adalah paparan mengenai kondisi di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah.

A. Provinsi Bengkulu

Perempuan di Provinsi Bengkulu belakang ini terhitung ada yang bekerja di sektor publik dalam berbagai lembaga pemerintah baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Dalam lembaga legislatif yaitu DPRD I dan II ini nampak bahwa perempuan Indonesia sudah memperoleh ruang dengan adanya *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilannya sebesar 30% di legislatif/DPRD. Data Statistik Daerah Bengkulu (2016) menunjukkan bahwa jumlah perempuan belum memenuhinya dengan hanya 15.9% orang yang menjadi anggota DPRD I dan II jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (84.1%).

Tabel 14. Indikator di Bidang Politik di Provinsi Bengkulu

No	Jabatan	Perempuan	Laki laki	Persentase (%)
1	Anggota DPRD provinsi			
	Pimpinan	1	3	25

No	Jabatan	Perempuan	Laki laki	Persentase (%)
	Komisi I	1	8	11.1
	Komisi II	4	4	50
	Komisi III	0	13	0
	Komisi IV	4	7	36.4
2	Bupati/walikota	0	11	0
3	Lembaga Yudikatif			
	Eselon I	0	0	0
	Eselon II	7	41	17.07
	Eselon III	71	231	30.74
	Eselon IV	267	503	53.08
	Eselon V	345	775	44.52
	Jumlah	690	1550	30.80
4	Lembaga Eksekutif			
	Pegawai Negeri Sipil			
	Golongan I	11	43	20.75
	Golongan II	672	755	45.65
	Golongan III	2279	2579	46.91
	Golongan IV	189	468	28.77
	Jumlah	3151	3485	47.20

Sumber: BPS Bengkulu 2014

Data pada Tabel 14 menunjukkan bahwa pada Komisi III seluruh anggotanya adalah laki-laki dan hanya di Komisi II yang ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan laki-laki dalam dunia politik mengakibatkan jumlah perempuan dalam badan legislatif masih jauh dari memadai. Meski begitu jumlah perempuan yang terpilih melalui mekanisme pengkaderan dalam partai politik ini tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung.

Keterwakilan perempuan di lembaga yudikatif/kejaksaan masih sangat sedikit. Jumlah perempuan yang ada dalam lembaga ini sebesar 30.80% dimana di tiap eselonnya juga lebih banyak laki-laki. Hanya di eselon III/b yang diduduki oleh perempuan. Sementara itu posisi perempuan juga mulai nampak dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu dengan menempati jabatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

tahun 2013 hampir sama yaitu 52.80 % laki-laki dan 47.20% perempuan. Menurut golongan kepangkatan di golongan I dan golongan IV didapati data bahwa jumlah laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. akan tetapi pada golongan II dan III hampir seimbang antara tenaga laki-laki dan perempuan. Di bidang publik lainnya, jumlah keterwakilan perempuan sebagai lurah/camat sangat sedikit ($\leq 10\%$) sementara itu jumlah perempuan sebagai anggota dalam kepengurusan koperasi sebesar 23%. Hal ini dapat disebabkan konstruksi nilai budaya patriarki yang masih mengakar pada masyarakat dimana pemimpin atau pengambil keputusan adalah harus laki-laki. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan bahkan terus berkuat pada feminisasi kemiskinan akibat faktor ketenagakerjaan yang juga tidak banyak berpihak pada perempuan.

Tabel 15. Jumlah Penduduk dalam Jabatan DPRD Provinsi Bengkulu

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki	Sumber dan tahun
1	Kepala desa dan aparat pemerintahan	Bupati : 0% Camat: 12.5% Lurah : 6.4%	Bupati : 100% Camat : 87.5% Lurah : 93.6%	Biro Pemerintahan Setda Bengkulu (2014). Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu (2014). BPMPD Provinsi Bengkulu (2014)
2	Jumah keanggotaan koperasi	23%	77%	Profil Gender dan anak Bengkulu 2014

Berikut adalah data persentase daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2014.

Tabel 16 Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu menurut Hasil Pemilihan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu tahun 2014

No	Dapil	2014				
		L	%	P	%	Jumah
1	Dapil I (Kota Bengkulu)	52	61,2%	33	38,8%	85
2	Dapil II (Bengkulu Utara-Bengkulu Tengah)	65	67,7%	31	32,3%	96
3	Dapil III (Muko-Muko)	24	51,1%	23	48,9%	47
4	Dapil IV (Rejanglebong-Lebong)	63	67,0%	31	33,0%	94
5	Dapil V (Kepahiang)	22	50,0%	22	50,0%	44
6	Dapil VI (Bengkulu Selatan-Kaur)	46	56,8%	35	43,2%	81
7	Dapil VII (Seluma)	81	81,8%	18	18,2%	99

No	Dapil	2014				
		L	%	P	%	Jumah
	Provinsi Bengkulu	353	64,7%	193	35,3%	546

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu

Tabel 16 menunjukkan bahwa setiap daerah pemilihan (Dapil) sudah menerapkan peraturan minimal keterwakilan perempuan minimal 30%. Hanya terdapat satu Dapil yaitu dapil VII (Kabupaten Seluma) yang hanya memiliki 18 calon tetap anggota DPRD Provinsi atau hanya 18.2%. Bahkan di Dapil V (Kabupaten Kepahiang) representatif perempuan sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi sudah mencapai 50%.

Berikut adalah data terkait persentase anggota DPRD Provinsi Bengkulu menurut Dapil.

Tabel 17 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menurut Hasil Pemilihan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu tahun 2014-2019

No	Dapil	2014-2019				
		L	%	P	%	Jumah
1	Dapil I (Kota Bengkulu)	5	62,5%	3	37,5%	8
2	Dapil II (Bengkulu Utara-Bengkulu Tengah)	7	87,5%	1	12,5%	8
3	Dapil III (Muko-Muko)	2	50,0%	2	50,0%	4
4	Dapil IV (Rejanglebong-Lebong)	9	50,0%	9	50,0%	18
5	Dapil V (Kepahiang)	4	50,0%	4	50,0%	8
6	Dapil VI (Bengkulu Selatan-Kaur)	6	85,7%	1	14,3%	7
7	Dapil VII (Seluma)	3	60,0%	2	40,0%	5
	Provinsi Bengkulu	36	62,1%	22	37,9%	58

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu

Tabel 17 bahwa secara keseluruhan setiap dapil juga telah menerapkan peraturan minimal keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 30%. Terdapat 2 Dapil yang memiliki persentase keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi yang kurang dari 30% yaitu Dapil II (Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah) dan Dapil IV (Bengkulu Selatan-Kaur). Padahal saat pencalonan anggota DPRD Provinsi sebelumnya, kedua Dapil ini sudah memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif perempuan minimal 30%. Penurunan persentase keterlibatan perempuan di DPRD Provinsi pada dua Dapil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor

seperti budaya patriarki di kedua Dapil yang lebih mengkonstruksi pembenaran bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki. Terdapat 2 Dapil yaitu Dapil III (Muko-Muko) dan Dapil IV (Rejanglebong-Lebong) yang memiliki kesetaraan gender dalam perwakilan anggota DPRD Provinsi (50% laki-laki dan 50% perempuan).

B. Bengkulu Tengah

Tidak jauh berbeda dengan jumlah laki-laki dan perempuan anggota DPRD provinsi, posisi anggota DPRD Kabupaten/kota di Bengkulu Tengah juga masih didominasi oleh laki-laki hingga 80% (KPU Bengkulu, 2015). Tidak tampak kesetaraan gender pada bagian pimpinan maupun anggota dari komisi.

Tabel 18. Indikator di Bidang Politik di Bengkulu Tengah

No	Jabatan	Perempuan	Laki laki	Persentase (%)
1	Anggota DPRD Kab/Kota			
	Pimpinan	0	3	0
	Komisi I	1	6	14.3
	Komisi II	0	6	0
	Komisi III	2	7	22.2

Tidak jauh berbeda dengan keadaan politik di Provinsi Bengkulu, secara keseluruhan posisi pemerintahan (lurah/camat) lebih banyak diduduki oleh laki-laki (tabel 19). Hanya jumlah anggota koperasi di Bengkulu Tengah yang sudah mulai tampak kesetaraan gender yaitu perempuan (45%) dan laki-laki (55%).

Tabel 19. Jumlah Penduduk dalam Jabatan DPRD Bengkulu Tengah

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki	Sumber dan tahun
1	Kepala desa dan aparat pemerintahan	Bupati/walikota : 0% Camat: 10% Lurah : 4%	Bupati/walikota : 100% Camat: 90% Lurah : 96%	Biro Pemerintahan Setda Bengkulu (2014). Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu (2014). BPMPD Provinsi Bengkulu (2014)

No	Variabel	Perempuan	Laki-laki	Sumber dan tahun
2	Persentase keanggotaan koperasi	45%	55%	Profil Gender dan anak Bengkulu 2014

Akses yang sudah dibuka bagi perempuan dalam jabatan strategis dalam lembaga publik pemerintahan ini perlu diapresiasi sebagai langkah maju pada perempuan di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah untuk mau terlibat dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Jumlah perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan ini dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk menurunkan program pembangunan yang responsif gender di provinsi ini. Berikut disajikan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menurut Partai politik tahun 2014

Tabel 20 Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menurut Partai Politik tahun 2014

No	Dapil	2014				
		L	%	P	%	Jumlah
1	Nasdem	12	63,2%	7	36,8%	19
2	PKB	12	66,7%	6	33,3%	18
3	PKS	10	62,5%	6	37,5%	16
4	PDI	15	68,2%	7	31,8%	22
5	Golkar	10	62,5%	6	37,5%	16
6	Gerindra	15	68,2%	7	31,8%	22
7	Demokrat	10	52,6%	9	47,4%	19
8	PAN	8	66,7%	4	33,3%	12
9	PPP	10	55,6%	8	44,4%	18
10	Hanura	12	63,2%	7	36,8%	19
11	Bulan Bintang	11	57,9%	8	42,1%	19
12	PKP	7	58,3%	5	41,7%	12
	Jumlah	132	62,3%	80	37,7%	212

Sumber: KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa semua partai politik telah menyumbangkan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah minimal 30%. Dari 212 calon tetap, sekitar 37.7% merupakan calon tetap wanita. Namun setelah dilakukan pemilihan calon anggota DPRD Bengkulu Tengah,

hanya 16.7% anggota DPRD perempuan yang terpilih. Hal ini menggambarkan belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam politik.

Tabel 21 Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menurut Partai Politik tahun 2014-2019

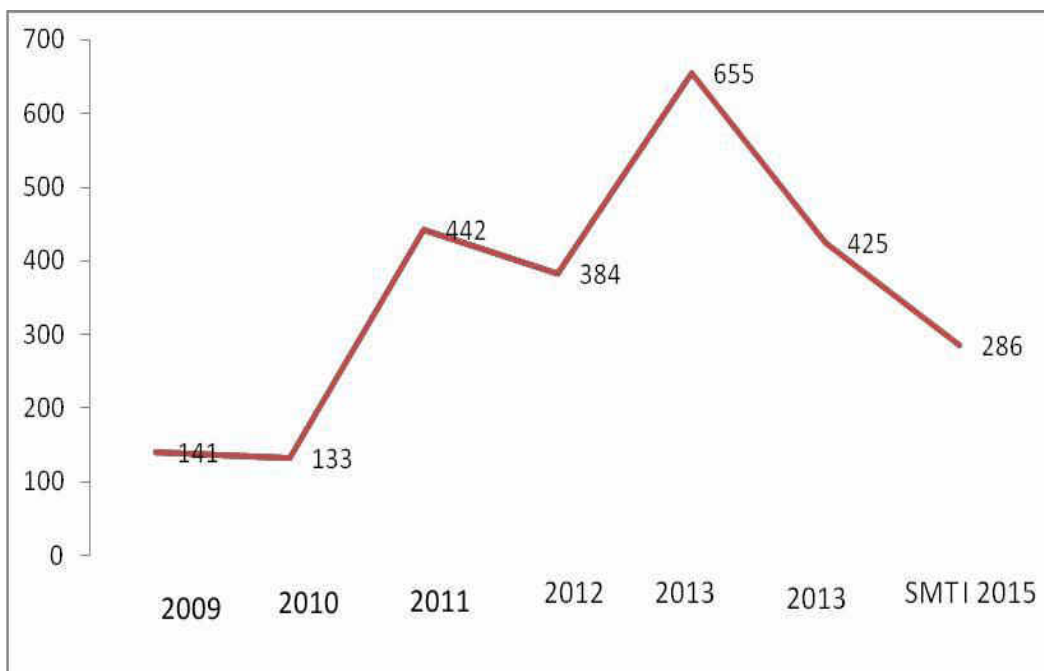
No	Dapil	2014-2019				
		L	%	P	%	Jumah
1	Nasdem	3	100,0%	0	0,0%	3
2	PKB	3	100,0%	0	0,0%	3
3	PKS	1	100,0%	0	0,0%	1
4	PDI	2	66,7%	1	33,3%	3
5	Golkar	3	75,0%	1	25,0%	4
6	Gerindra	3	75,0%	1	25,0%	4
7	Demokrat	0	0,0%	0	0,0%	0
8	PAN	0	0,0%	0	0,0%	0
9	PPP	2	100,0%	0	0,0%	2
10	Hanura	3	75,0%	1	25,0%	4
11	Bulan Bintang	0	0,0%	0	0,0%	0
12	PKP	0	0,0%	0	0,0%	0
	Jumlah	20	83,3%	4	16,7%	24

Sumber: KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Partai politik yang hanya diwakili oleh anggota laki-laki yaitu partai Nasdem, PKB, PKS, dan PPP. Padahal sebelumnya keempat partai politik ini sudah memiliki keterwakilan perempuan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD. Namun masyarakat Bengkulu Tengah yang ditengarai memiliki konstruksi budaya yang menjadikan ajaran agama Islam sebagai prinsip dalam berperilaku keseharian juga tampak memberikan pengaruh pada konstruksi peranan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat dimana laki-laki lebih dianggap mampu sebagai pemimpin dibandingkan perempuan sebagai warga kelas dua (subordinasi) dalam aktivitas publik. Hal inilah yang menjadikan perempuan tidak dapat memberikan suara terbanyaknya dalam parlemen untuk menyusun program yang responsif gender di bidang pemenuhan hak hidup lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun politik itu sendiri.

IX. PROFIL FEMINISASI KEMISKINAN DI BIDANG SOSIAL

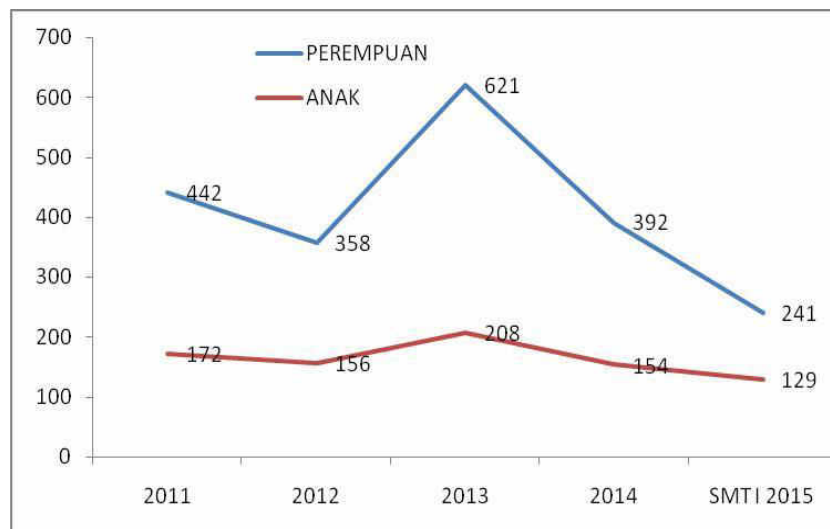
Indikator yang digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam bidang sosial yaitu adanya diskriminasi pada perempuan di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan sumber dari BPP-KB Kab/Kota tahun 2014 dan 2015 hingga bulan Juni. Indikator sosial yang dilihat dalam kajian ini yaitu: 1) jumlah kekerasan pada perempuan dan anak menurut kelompok usia; 2) Jenis kekerasan; 3) Tempat kejadian kekerasan; 4) Korban berdasarkan tingkat pendidikan dan status bekerja; 5) Penanganan yang sudah diberikan pada korban; dan 6) Pelaku kekerasan. Gambar 4 berikut ini menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu tahun 2010 hingga 2015.



Gambar 4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2010 S.D Juni 2015

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa jumlah korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 655 korban dan kemudian menurun kembali pada tahun 2014 menjadi

425 korban. Penurunan jumlah korban kekerasan terus menurun hingga pada semester I (Juni 2015) jumlah korban kekerasan di Bengkulu sejumlah 286 korban. Kemudian, gambar selanjutnya menunjukkan *trend* jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu tahun 2011 s.d juni 2015



Gambar 5. Trend Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2011 S.D Juni 2015

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan selalu lebih tinggi dari jumlah korban kekerasan anak untuk setiap tahunnya. Anak perempuan pun mendominasi sebagai korban kekerasan. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2013, begitu juga untuk jumlah korban kekerasan pada anak. Kemudian dengan membandingkan data tahun 2014 dan 2015 diperoleh adanya penurunan baik jumlah korban kekerasan perempuan maupun anak kembali mengalami penurunan pada tahun dua tahun tersebut. Namun hal ini dibatasi bahwa data tahun 2015 ini baru pada bulan Juni 2015 sehingga belum dapat dibandingkan utuh sebagai unit waktu 1 tahun. Berikut disajikan data jumlah korban kekerasan menurut kelompok umur dan Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2014.

Tabel 22 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total	
		Anak (0<18 Tahun)		Dewasa (>18 Tahun)			
		L	P	L	P	L	P
1	Bengkulu Selatan	6	13		21	6	34
2	Rejang Lebong	18	27		65	18	92
3	Bengkulu Utara		20		12		32
4	Kaur		1		13		14
5	Seluma		6		7		13
6	Mukomuko		12		3		15
7	Lebong	1	2		6	1	8
8	Kepahiang	3	12		32	3	44
9	Bengkulu Tengah		4		2		6
10	Kota Bengkulu	5	24		110	5	134
	Provinsi Bengkulu	33	121		271	33	392

Sumber data : BPP-KB Kab/Kota

Berdasarkan Tabel 22, dari jumlah korban kekerasan di provinsi ini sebanyak 92.2% adalah perempuan, terdiri atas perempuan dewasa dan anak, sementara laki-laki sebanyak 7.8%. Juga didapati bahwa terdapat 31% dari jumlah korban kekerasan tersebut adalah anak. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang dilanggar hak asasinya sehingga menerima kekerasan dan ini sudah dimulai sejak dini (anak).

Hal yang sama juga terjadi pada kekerasan di Bengkulu Tengah. Keseluruhan korban kekerasan tahun 2014 di Kabupaten Bengkulu Tengah 100% adalah perempuan, dimana korban kekerasan anak perempuan mencapai 66.7% dan korban kekerasan perempuan dewasa mencapai 33%. Berikut disajikan data korban kekerasan menurut kelompok umur dan Kabupaten/kota tahun 2015 s.d Juni 2015.

Tabel 23 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total	
		Anak (0<18 Tahun)		Dewasa (>18 Tahun)			
		L	P	L	P	L	P
1	Bkl Selatan	3	18	1	24	4	42
2	Rejang Lebong	1	9	10	9	11	18
3	Bkl Utara	1	16		14	1	30
4	Kaur		2	2	8	2	10
5	Seluma	2	9	12	3	14	12
6	Mukomuko		7		3		10
7	Lebong	2	27		9	2	36
8	Kepahiang	3	9		12	3	21
9	Bkl Tengah		6		4		10
10	Kota Bengkulu		14	8	38	8	52
	Provinsi Bkl	12	117	33	124	45	241

Sumber data : BPP-KB Kab/Kota

Dari jumlah kekerasan yang terjadi di provinsi ini hingga bulan Juni tahun 2015 maka didapati sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan (84.3%), baik dewasa maupun anak, sementara laki-laki sebesar 15.73%. Dari jumlah kekerasan yang ada hingga Juni 2015 ini, korban kekerasan perempuan dewasa sebesar 63.8% dan 28.5% adalah anak perempuan.

Berbeda dengan di Provinsi Bengkulu dimana jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mengalami penurunan pada tahun 2014 ke tahun 2015, justru terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jika pada tahun 2014 jumlah korban kekerasan adalah 6 orang kini meningkat menjadi 10 orang pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan tidak dipenuhinya hak asasi bagi perempuan untuk terhindar dari diskriminasi berupa kekerasan.

Kekerasan sendiri dapat berupa fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, dan lainnya. Dua kekerasan yang dominan dialami oleh perempuan dan anak pada tahun 2014 yaitu 49.6% korban kekerasan perempuan dan anak mengalami kekerasan fisik dan 147 korban atau 39% korban mengalami kekerasan seksual. Korban di Bengkulu Tengah terdiri dari 4 korban atau 66.7% korban kekerasan perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual dan 32 korban atau 33.3% mengalami kekerasan fisik

Tabel 24 Jumlah perempuan dan anak menurut jenis kekerasan di Provinsi Bengkulu tahun 2014

No	Kab/Kota	Jenis Kekerasan						
		Fisik	Psikis	Sek sual	Eksploi tasi	Penelan taran	Trafi king	Lain nya
1.	B. Selatan	13	2	19		5	2	3
2.	Rj. Lebong	61		41		4		4
3	Bkl. Utara	9		17				6
4	Kaur	4	2	4		2		2
5	Seluma	7		6				
6.	Mukomuko	6	4	9				
7	Lebong	6		3				
8.	Kepahiang	31	1	24				
9.	Bkl Tengah	2		4				
10	Kota Bkl	48	15	20		1		
	Jumlah	187	24	147		12	2	15

Sumber data : BPP-KB Kab/Kota

Berdasarkan Tabel 25 yang menunjukkan data kekerasan tahun 2015 di Provinsi Bengkulu terlihat sebagian besar korban anak dan perempuan mengalami kekerasan fisik (38.4%) dan seksual (39.4%). Jumlah ini pun masih dapat bertambah karena belum utuh data tahun 2015. Sama dengan tahun 2014, di tahun 2015 jenis kekerasan yang paling banyak menimpa korban baik anak maupun perempuan di Bengkulu Tengah adalah kekerasan seksual (70%), kekerasan fisik (10%), dan lainnya (20%). Berikut disajikan data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan menurut jenis kekerasan sampai Juni 2015.

Tabel 25 Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015

No	Kab/Kota	Jenis Kekerasan						
		Fisik	Psikis	Sek sual	Eksploi tasi	Penelan taran	Trafi king	Lain nya
1.	B. Selatan	26	2	16		2		
2.	Rj. Lebong	13		10		6		19
3	Bkl. Utara	9	2	20		1	1	1
4	Kaur	8		2			2	
5	Seluma	2	3	1				19
6.	Mukomuko	2		8				
7	Lebong	11		27				
8.	Kepahiang	10		14				
9.	Bkl Tengah	1		7				2
10	Kota Bkl	38		18		1		8
	Jumlah	120	7	123	0	10	3	49

Sumber data : BPP-KB Kab/Kota

Kekerasan dapat dilakukan di rumahtangga, lingkungan, tempat kerja, sekolah maupun tempat lainnya. Berikut ditampilkan data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan menurut tempat kejadian tahun 2014.

Tabel 26 Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Tempat Kejadian			Jumlah
		Rumah Tangga	Lingkungan	Lainnya	
1.	Bkl Selatan	16	2	22	40
2.	Rejang Lebong	32	8	70	110
3	Bengkulu Utara	22		10	32
4	Kaur	8		6	14
5	Seluma	12		1	13
6.	Mukomuko	5		10	15
7	Lebong	6		3	9
8.	Kepahiang	32		15	47
9.	Bkl Tengah	2		4	6
10	Kota Bkl	97	4	38	139
	Provinsi Bkl	232	14	179	425

Sumber data: BPP-KB Kab/Kota, RSUD, WCC

Ket :Lainnya : tempat kerja, sekolah, tempat umum

Tabel 26 dan 27 menunjukkan tempat kejadian, terlihat kecenderungan yang berbeda di Provinsi Bengkulu dimana tahun 2014 sebanyak 54.6% paling banyak tempat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ada di dalam rumah tangga namun untuk tahun 2015 sebanyak 65.7% bertempat di tempat umum seperti sekolah maupun tempat kerja. Meski begitu pada tahun 2015 ini masih sebanyak 54.6% tempat kejadian kekerasan di Provinsi Bengkulu ini ada di rumahtangga. Hal ini merupakan gambaran dari bentuk dominasinya laki-laki dalam kekuasaan terhadap perempuan yang menyelip masuk hingga rumahtangga dan hal itu artinya bisa dilakukan oleh suami pada isterinya atau anak perempuannya.

Terkait dengan kekerasan rumahtangga maka sebetulnya sudah ada perangkat hukum berupa UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga sudah menyatakan tujuan dari perundangan ini adalah untuk: 1) menghormati hak asasi manusia; 2) keadilan dan kesetaraan gender; 3) nondiskriminasi; dan 4) perlindungan korban. Dengan demikian perangkat hukum ini seharusnya sudah bisa menjadi penghambat munculnya kekerasan dalam rumahtangga.

Berbeda dengan di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2014 dan 2015 yang terdata baru sampai bulan Juni, tempat kejadian kekerasan di Bengkulu Tengah terbanyak adalah di lainnya yaitu tempat kerja, sekolah, dan tempat umum menjadi tempat kejadian kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dan anak. Berikut adalah data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan menurut tempat kejadian di Provinsi Bengkulu tahun 2015

Tabel 27 Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015

No	Kabupaten/Kota	Tempat Kejadian			Jumlah
		Rumah Tangga	Lingkungan	Lainnya	
1.	Bkl Selatan	8		38	46
2.	Rejang Lebong	10		19	29
3	Bengkulu Utara	5	3	23	31
4	Kaur	1		11	12

No	Kabupaten/Kota	Tempat Kejadian			Jumlah
		Rumah Tangga	Lingkungan	Lainnya	
5	Seluma			26	26
6	Mukomuko	2		8	10
7	Lebong	2		36	38
8.	Kepahiang	14		10	24
9.	Bkl Tengah	2		8	10
10	Kota Bkl	39		21	60
	Provinsi Bkl	83	3	188	286

Sumber data: BPP-KB Kab/Kota, RSUD, WCC

Ket :Lainnya (tempat kerja, sekolah, tempat umum)

Kekerasan dapat menimpa perempuan dan anak dari beragam latar belakang. Namun berdasarkan data pada Tabel 28 dan 29 terlihat jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu tahun 2014 dan 2015 sebagian besar berpendidikan SLTP dan SLTA. Jumlah korban kekerasan dari tingkat pendidikan SLTP sebanyak 26.1% (2014) dan 36.3% (2015). Sementara itu jumlah korban kekerasan dari tingkat pendidikan SLTA sebanyak 25.6% (2014) dan 26.2 (2015).

Tabel 28 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

No	Provinsi	Tingkat Pendidikan					Total
		skl/tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
1	Bkl Selatan		10	23	7		40
2	Rejang Lebong	39	30	28	12	1	110
3	Bkl Utara	9	14	8	1		32
4	Kaur		1	1	11	1	14
5	Seluma	1	1	4	7		13
6	Mukomuko	2	1	6	6		15
7	Lebong			2	7		9
8	Kepahiang	9	9	15	11	3	47
9	Bkl Tengah	1	2	1	2		6
10	Kota Bkl	16	19	23	45	36	139
	Jumlah	77	87	111	109	41	425

Sumber data : BPPKB Kab/Kota

Berdasarkan tabel 28, terlihat bahwa pada tahun 2014 korban kekerasan perempuan dan anak sebagian besar adalah berpendidikan SLTP (26.1%) dan SLTA (25.6%). Di Bengkulu Tengah, pada tahun 2014 sebanyak 33.3% korban kekerasan perempuan dan anak berpendidikan SD dan SLTA. Berdasarkan tabel 28, sama dengan tahun 2014, tahun 2015 korban kekerasan anak dan perempuan sebagian besar berpendidikan SLTP (36.2%) dan SLTA (26.2%). Di Bengkulu Tengah, pada tahun 2015 korban kekerasan sebagian besar berpendidikan SLTP dan SLTA juga (30%). Korban perempuan maupun anak perempuan yang memiliki latar belakang SMP dan SLTA juga dapat melakukan banyak aktivitas public seperti bekerja dan sekolah masih mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Hal ini menandakan perempuan yang melakukan aktivitas ini pun masih dianggap lebih rendah oleh pelakunya sehingga menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan terhadapnya.

Tabel 29 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015

No	Provinsi	Tingkat Pendidikan					Total
		skl/tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
1	Bkl Selatan	3	4	2	13	1	23
2	Rejang Lebong	2	6	15	6		29
3	Bkl Utara	1	3	4	8		15
4	Kaur	9			2		1
5	Seluma	6	4	5	8	1	2
6	Mukomuko	3	1	4	2		10
7	Lebong		8	29	1		38
8	Kepahiang	3		12	8	1	21
9	Bkl Tengah	2	1	3	3	1	10
10	Kota Bkl	1	9	9	9	16	16
	Jumlah	30	36	83	60	20	229

Sumber data : BPPKB Kab/Kota

Tabel 30 menunjukkan data mengenai jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu tahun 2014 dan 2015. Data menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah memiliki status pekerjaan tidak bekerja.

Tabel 30 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014– bulan Juni 2015

No	Kabupaten/Kota	2014			2015-bulan Juni		
		Status Pekerjaan		Jumlah	Status Pekerjaan		Jumlah
		Tidak Bekerja	Bekerja		Tidak Bekerja	Bekerja	
1	Bkl Selatan	24	16	40	16	7	23
2	Rejang Lebong	74	36	110	15	14	29
3	Bkl Utara	29	3	32	15	8	23
4	Kaur	5	9	14	12		12
5	Seluma	3	10	13	14	5	19
6	Mukomuko	15		15	4		4
7	Lebong	8	1	9	30	8	38
8	Kepahiang	32	15	47	15	9	24
9	Bkl Tengah	5	1	6	8	2	10
10	Kota Bengkulu	67	72	139	27	26	53
	Provinsi	262	163	425	156	79	235

Sumber data : BPPKB Kab/Kota

Selain menunjukkan bahwa perempuan dan anak rentan atas terjadinya kekerasan pada dirinya baik di rumah tangga maupun ruang publik, dalam kajian ini juga hendak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam kurun waktu tahun 2014 dan 2015 ini cenderung melakukan kekerasan pada korban perempuan dan anak yang memiliki latar belakang SLTP dan SLTA. Dalam data tahun 2015 hingga bulan Juni 2015 yang disajikan pada Tabel 31 terlihat bahwa pada tahun 2014 sebagian besar pelaku dari 284 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah laki-laki (56%), perempuan (27%), dan yang belum teridentifikasi sebanyak 16.2%.

Berdasarkan usia, ditemukan bahwa pelaku kekerasan pada perempuan dan anak lebih banyak yang berusia lebih dari 18 tahun (60%) dibandingkan yang kurang dari 18 tahun (24%) atau yang belum terklasifikasi (16%). Karena data ini belum terpilah berdasarkan usia korban, maka hal ini menggambarkan bahwa

pelaku kekerasan pada anak pun dapat berasal dari pelaku yang juga masih berusia anak (kurang dari 18 tahun). Sayangnya dari 79 kasus kekerasan yang terdata pelakunya adalah perempuan terlihat bahwa pelaku yang masih anak-anak ini adalah perempuan (58%). Masih dari jumlah kasus yang dapat teridentifikasi tersebut, laki-laki usia lebih dari 18 tahun terlihat yang lebih banyak menjadi pelaku kekerasan pada anak dan perempuan, yaitu sebesar 57%.

Tabel 31 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 S.D Juni 2015

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur						
		Anak (0<18 Tahun)		Dewasa (>18 Tahun)		TDK ADA DATA	Total	
		L	P	L	P		L	P
1	Bkl Selatan	3	39		7	2	3	46
2	Rejang Lebong	2	1	9	17		11	18
3	Bkl Utara	6		17	1	7	23	1
4	Kaur					12		
5	Seluma	1	5	14	5	1	15	10
6	Mukomuko	3		7			10	
7	Lebong	2		9	4	23	11	4
8	Kepahiang	3	1	20		1	23	1
9	Bkl Tengah			10			10	
10	Kota Bengkulu	2		51			53	
	Provinsi Bkl	22	46	137	33	46	159	80

Sumber data: BPP-KB Kab/Kota

Hampir sama dengan tahun sebelumnya, 100% pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah laki laki dan berumur 18-24 tahun. Baik korban anak perempuan maupun pelaku yang masih berusia anak dan tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (miskin), kejadian kekerasan ini merupakan gambaran dari siklus peminggiran penduduk miskin yang akan semakin miskin jika mereka harus menerima akibat dari perbuatan yang mengharuskannya berada di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian pemenuhan pendidikan maupun kebebasan lainnya sebagai manusia akan terhenti selama di dalamnya. Dan jika terjadi pada korban perempuan, maka hal itu merupakan munculnya feminisasi kemiskinan karena ia akan semakin miskin dan tidak dapat mengakses program lainnya.

Bagaimana relasi yang terjadi antara pelaku dan korban? Hal ini coba dijelaskan dengan data yang ditampilkan pada Tabel 32 dan ditemukan bahwa pada tahun 2014, sebagian besar pelaku kekerasan di Provinsi Bengkulu adalah suami korban (40.5%) dan lainnya (rekan di sekitar lingkungan mereka) sebanyak 39.3%. Berbeda dengan di Provinsi Bengkulu, 66.7% pelaku kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bengkulu Tengah berasal bukan dari kerabat dekatnya melainkan teman di sekitar lingkungan mereka (rekan sekolah, rekan kerja, dan sebagiannya) dan berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 32 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban Di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

No	Kab/Kota	Hubungan Pelaku									
		Orang Tua		Keluarga		Suami/istri		Lainnya Sebutkan		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Bkl Selatan	2		8		13		14	3	37	3
2.	R.Lebong			5	6	3	6	43	47	51	59
3	B. Utara	12		10		5		4	1	31	1
4	Kaur				3		4	5	2	5	9
5	Seluma			1		7		5		13	
6.	Mukomuko					3		12		15	
7	Lebong					2	4	2	1	4	5
8.	Kepahiang	2		2	2	14	2	15	10	33	14
9.	Bkl Tengah					2		4		6	
10	Kota Bkl	7	2	18	1	85		26		136	3
	Prov. Bkl	23	2	44	12	134	16	130	64	331	94

Sumber data: BPP-KB Kab/Kota

Sementara itu data mengenai hubungan pelaku dengan korban kekerasan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 33. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaku kekerasan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 bukan berasal dari kerabat dekat korban melainkan dari rekan disekitar lingkungan mereka (lainnya)

sebanyak 44.4% dan berjenis kelamin laki-laki. Disusul kemudian terbanyak kedua adalah suami korban sebanyak 42.9%.

Tabel 33 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sampai juni 2015

No	Kab/Kota	Hubungan Pelaku											
		Orang Tua		Keluarga		Suami/ Istri		Lainnya Sebutkan		TDK ADA DATA		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P			L	P
1.	Bkl Selatan		1	11	1	17	6	14	1			42	9
2.	R.Lebong					4	4	7	14			11	18
3	B. Utara	2	1	4		3		14		7		23	1
4	Kaur									12			
5	Seluma		1		1	13	1	2	7	1		15	10
6.	Mukomuko	1				4	1	4				9	1
7	Lebong							11	4	23		11	4
8.	Kepahiang	3				8		13	1			24	1
9.	Bkl Tengah	1		3		2		4				10	
10	Kota Bkl	1		1		34		17				53	
	Prov. Bkl	8	3	19	2	85	12	88	27	43		198	44

Sumber data: BPP-KB Kab/Kota

Sama dengan tahun sebelumnya 40% pelaku kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Bengkulu Tengah berasal bukan dari kerabat dekatnya melainkan teman di sekitar lingkungan mereka (rekan sekolah, rekan kerja, dan sebagainya) dan berjenis kelamin laki-laki.

X. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN, EKONOMI, KESEHATAN, DAN POLITIK

Identifikasi dan analisis dari berjalannya program di bidang pendidikan selain dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, juga dilihat berdasarkan pemenuhan kebutuhan praktis maupun strategis yang dirasakan baik perempuan dan laki-laki. berikut ini adalah uraian mengenai analisis kebijakan program, dan kegiatan pada aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik; serta sintesis analisisnya.

10.1. Bidang Pendidikan

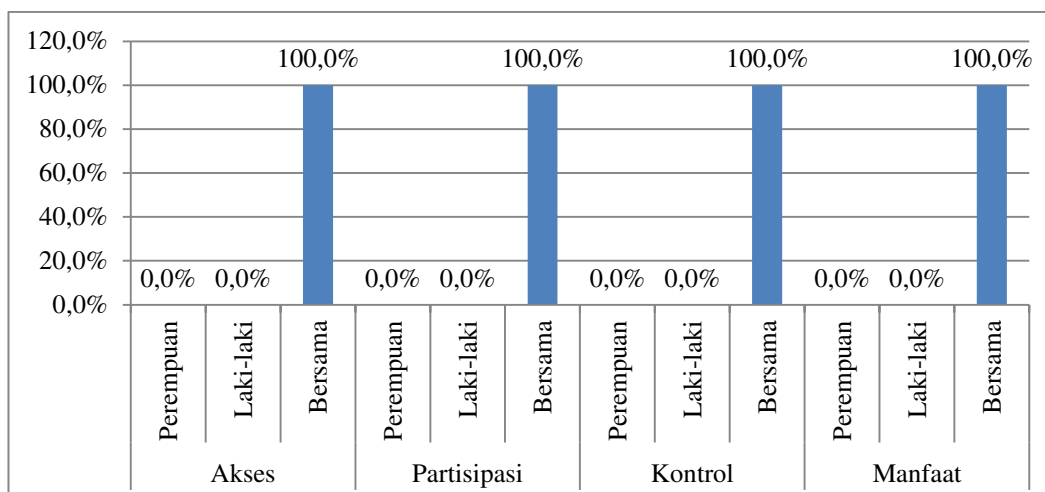
Data FGD menunjukkan bahwa program dan kegiatan di bidang pendidikan ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Harapan Makmur antara lain berbentuk beasiswa, BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan beasiswa miskin.

Tabel 34. Daftar Program di Bidang Pendidikan

No	Program	Lokasi Program
1	Beasiswa	Provinsi
2	Bina keluarga remaja (BKR)	Kabupaten
3	Program PIK-R	Kabupaten
4	BOS	Kecamatan dan Desa
5	Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Kecamatan
6	Bantuan beasiswa miskin	Kecamatan

Sumber: FGD Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur

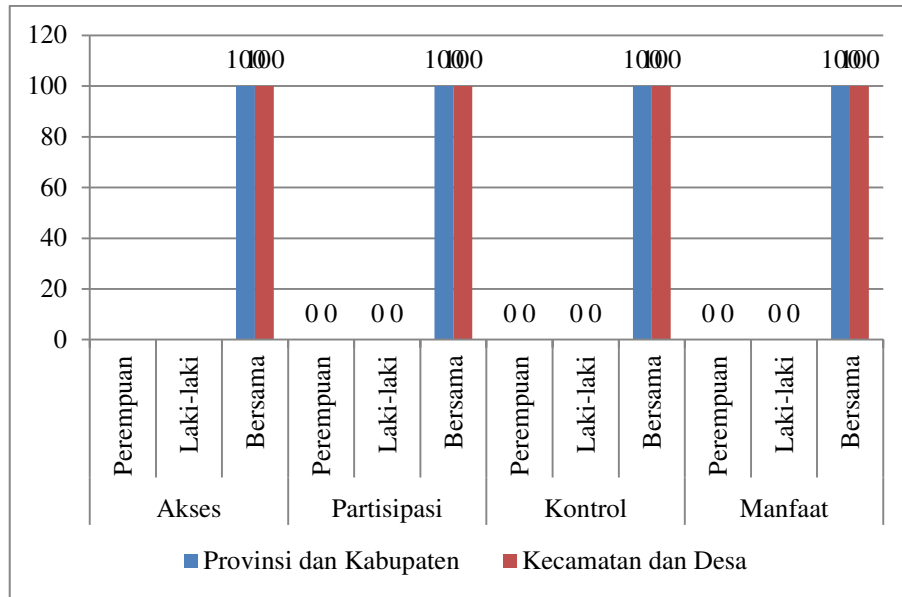
Program dan kegiatan di bidang pendidikan tersebut baik yang dijalankan di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa secara sekaligus menunjukkan sudah memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama baik bagi perempuan maupun laki-laki (Gambar 6).



Gambar 6. Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan DesaHarapan Makmur

Hal ini sejalan dengan analisis program yang berdasarkan perbandingan antara pengalaman penerima program di tingkat kecamatan dan desa dengan penyusun program di tingkat provinsi dan kabupaten. Hasilnya menunjukkan bahwa program nampak bahwa memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama baik bagi perempuan maupun laki-laki baik di semua tingkat pelaksanaan program. Gambar 6 menunjukkan bahwa warga di tingkat kecamatan maupun desa baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dapat mengakses program BOS, KIP maupun bantuan beasiswa miskin. secara bersama pula oleh penduduk perempuan maupun laki-laki.

Program BOS merupakan program di bidang pendidikan yang diidentifikasi ada di kecamatan maupun desa. Perempuan dan laki-laki di kecamatan dan desa menyatakan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama dari program tersebut. Sementara itu bagi aparat pemerintah provinsi dan kabupaten, program beasiswa, BKR, dan PIK-R yang didesain oleh pemerintah provinsi/kabupaten juga dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama dari program tersebut yang setara pada perempuan dan laki-laki.



Gambar 7. Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Pendidikan antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa

Dengan demikian terlihat bahwa program-program di bidang pendidikan tersebut dapat bertujuan untuk meningkatkan jumlah laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Padahal di sisi lain data BPS Bengkulu (2015) menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan (6.97) lebih rendah daripada laki-laki (8.08) dan selisih rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki di Bengkulu Tengah terpaut cukup jauh (± 2 tahun) lebih besar daripada selisih rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Bengkulu (± 0.46 tahun). Program di bidang pendidikan tersebut juga dapat memiliki tujuan meningkatkan jumlah laki-laki dan perempuan yang memiliki ijazah/STTB. Sementara itu ketimpangan juga ditunjukkan dari data BPS Bengkulu (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan laki-laki di semua jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program masih bersifat netral gender dimana tidak dijalankan berdasarkan keberpihakan untuk memperbaiki posisi perempuan yang lebih banyak terpinggirkan dalam bidang pendidikan ini.

10.2. Bidang Ekonomi

Program dan kegiatan di bidang ekonomi berdasarkan yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Harapan Makmur antara lain berbentuk pelatihan peningkatan softskill pekerja, pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pelatihan manajemen keuangan, dan lain-lainnya.

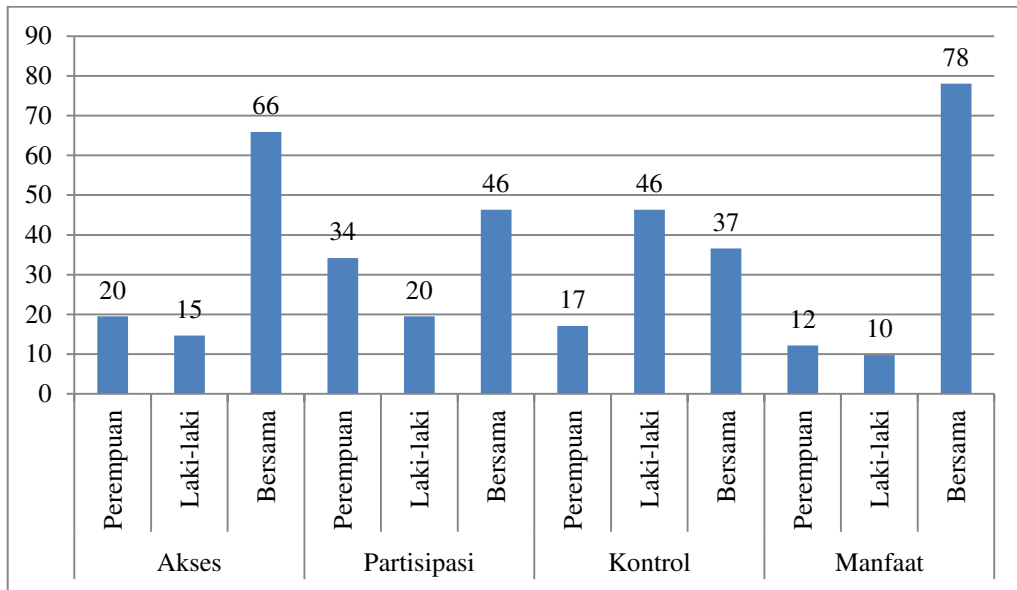
Tabel 35. Daftar Program di Bidang Ekonomi

No	Program	Lokasi Program
1	Pelatihan untuk peningkatan softskill pekerja	Provinsi
2	Pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Provinsi dan Kecamatan
3	Pelatihan Perbengkelan	Provinsi
4	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Provinsi
5	Promosi perdagangan	Provinsi
6	Pelatihan manajemen keuangan	Provinsi
7	Bantuan koperasi untuk Koperasi wanita	Provinsi
8	Pelatihan pengolahan hasil pertanian	Provinsi
9	Pelatihan usaha pengolahan pangan	Provinsi
10	Pemberian bibit ke kelompok tani	Provinsi
11	Usaha peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga	Kabupaten
12	Pendampingan perempuan pedagang (2015)	Kabupaten
13	Sosialisasi penguatan program PKK	Kabupaten
14	Bantuan dana bergulir	Kabupaten
15	Pembinaan kelompok tani	Kabupaten
16	Pembinaan kelompok wanita tani	Kabupaten
17	Pembinaan gapoktan	Kabupaten
18	Monitoring raskin	Kabupaten
19	Sosialisasi untuk peningkatan kapasitas ibu-ibu	Kabupaten
20	Program sosialisasi manajemen kewirausahaan	Kabupaten
21	Sosialisasi pembukuan koperasi	Kabupaten
22	Pajale dalam bentuk bantuan bibit dari Disperta 2015-sekarang	Kecamatan
23	Swasembada daging (sapi bergulir dari 2013-sekarang)	Kecamatan
24	Koperasi simpan pinjam	Kecamatan dan desa
25	PNPM simpan pinjam	Kecamatan
26	Tabungan koperasi Dahlia berbadan hukum	Kecamatan
27	Koperasi simpan pinjam yang belum berbadan	Kecamatan

No	Program	Lokasi Program
	hukum	
28	Kerajinan manik-manik	Kecamatan
29	Penyuluhan penggunaan gas	Kecamatan
30	Kelompok usaha bersama "anggrek"	Kecamatan
31	Bantuan alat penggilingan tepung, oven, mesin pemotong ubi dari Ketahanan pangan	Kecamatan
32	Unit penyewaan bahan	Kecamatan
33	Koperasi melati dari BKKBN program UPPKS diikuti oleh akseptor KB	Kecamatan
34	Penyuluhan pertanian	Desa
35	Bantuan untuk kelompok tani (bantuan pupuk non organik, bibit, obat-obatan)	Desa
36	Pelatihan pembuatan kerupuk dll	Desa
37	Kegiatan pembuatan kerajinan tangan “ Anggrek Putih” Kipas, kukusan dan kurs bambu	Desa
38	Kegiatan memasak dari Dinas untruk pembuatan manisan tomat dan terong	Desa
39	Program untuk suami : Penyuluhan, koperasi PKK/simpan pinjam	Desa

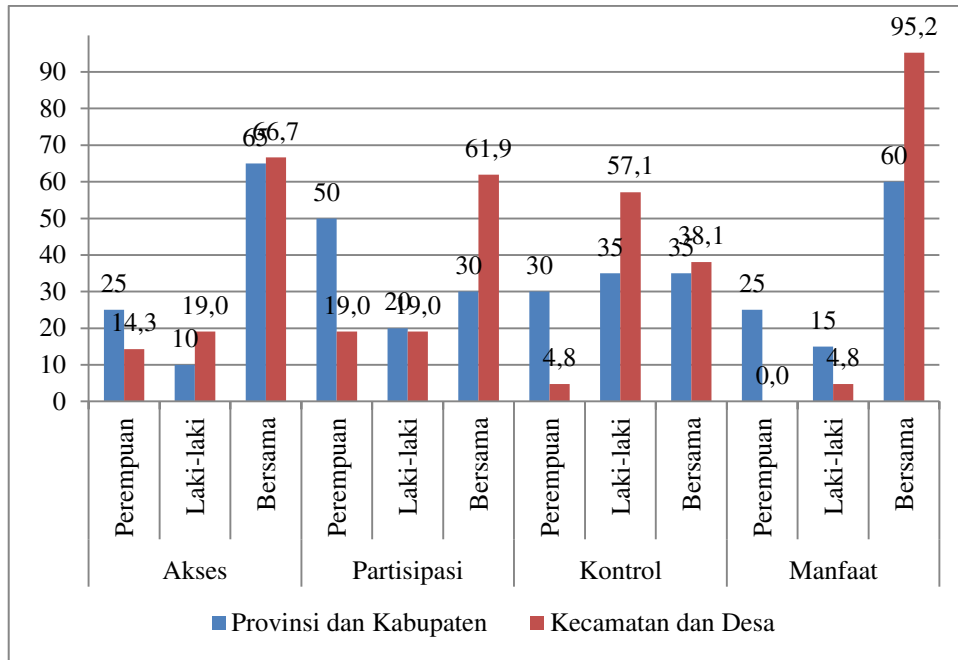
Sumber: FGD Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur

Berbeda dengan program dan kegiatan di bidang pendidikan, pada bidang ekonomi nampak pada Gambar 8 bahwa meski akses pada 66% program sudah dibuka untuk bersama (perempuan dan laki-laki) seperti pelatihan manajemen keuangan, perbengkelan, dan pengolahan hasil pertanian yang dilaksanakan di tingkat provinsi namun hanya 46% program yang di dalamnya ada partisipasi oleh bersama (laki-laki dan perempuan). Program seperti pelatihan perbengkelan (provinsi), pembinaan gapoktan (kabupaten), dan penyuluhan pertanian (desa) yang tadinya dibuka untuk bersama namun ketika partisipasi hanya diikuti oleh laki-laki saja. Bahkan kontrol pada program dan kegiatan di bidang ekonomi ini lebih banyak pada laki-laki maupun secara bersama pada perempuan dan laki-laki. Manfaat program di bidang ini lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan laki-laki secara bersama.



Gambar 8. Program dan Kegiatan di Bidang Ekonomi yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur

Hal ini sejalan dengan analisis program yang berdasarkan perbandingan antara pengalaman penerima program di tingkat kecamatan dan desa dengan penyusun program di tingkat provinsi dan kabupaten yang menunjukkan bahwa akses sudah dibuka untuk bersama (perempuan dan laki-laki). Meski akses untuk bersama namun pada partisipasi program dan kebijakan di provinsi/kabupaten dinilai perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki seperti program Bantuan usaha ekonomi produktif, Usaha peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga. Terlebih beberapa program memang ditujukan untuk perempuan, seperti Pendampingan perempuan pedagang dan Pembinaan kelompok wanita tani. Meskipun begitu data menunjukkan seperti pada program di bidang pendidikan dimana munculnya laki-laki yang memiliki kontrol pada program terutama pada program yang dapat diakses bersama (laki-laki dan perempuan).



Gambar 9. Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa

Namun hal ini ternyata berbeda pada praktek nyata akses dan partisipasi pada program di kecamatan/desa yang menunjukkan lebih banyak melibatkan/partisipasi dari pihak bersama (perempuan dan laki-laki) dibandingkan di provinsi/kabupaten. Dan sejalan dengan pandangan program di provinsi/kabupaten, jumlah program yang dikontrol oleh laki-laki ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan terutama pada program/kegiatan di kecamatan/desa yang dapat diakses secara bersama. Hal ini diakui bahwa dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif ditentukan oleh suami selaku penanggung jawab tertinggi dalam rumah tangga khususnya terkait dengan penyusunan keuangan, seperti dalam program kerajinan tangan Anggrek, kerupuk, atau bantuan alat penggilingan tepung.

Lebih tingginya partisipasi perempuan dalam program di provinsi/kabupaten perlu ditelaah berdasarkan sejauhmana program dan kegiatan didesain untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Data di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan; serta jumlah pekerja

yang statusnya tidak penuh lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Sehingga dengan demikian maka program di provinsi/kabupaten dapat dikatakan lebih responsif gender jika program tersebut memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan agar lebih setara dengan laki-laki dalam hal ekonomi dibandingkan program di tingkat kecamatan/desa yang bersifat netral gender.

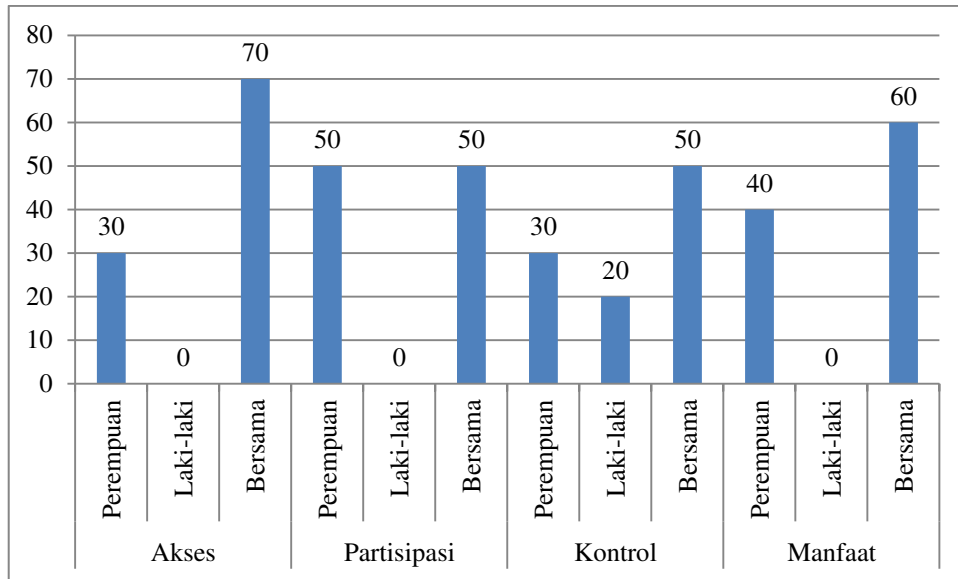
10.3. Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan di bidang kesehatan yang berjalan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Harapan Makmur antara lain berbentuk Keluarga Berencana (KB), Posyandu (Morgu Mulyo), Posyandu (Tb Jambu), Posbindu Lansia, dan lain-lainnya.

Tabel 36. Daftar Program di Bidang Kesehatan

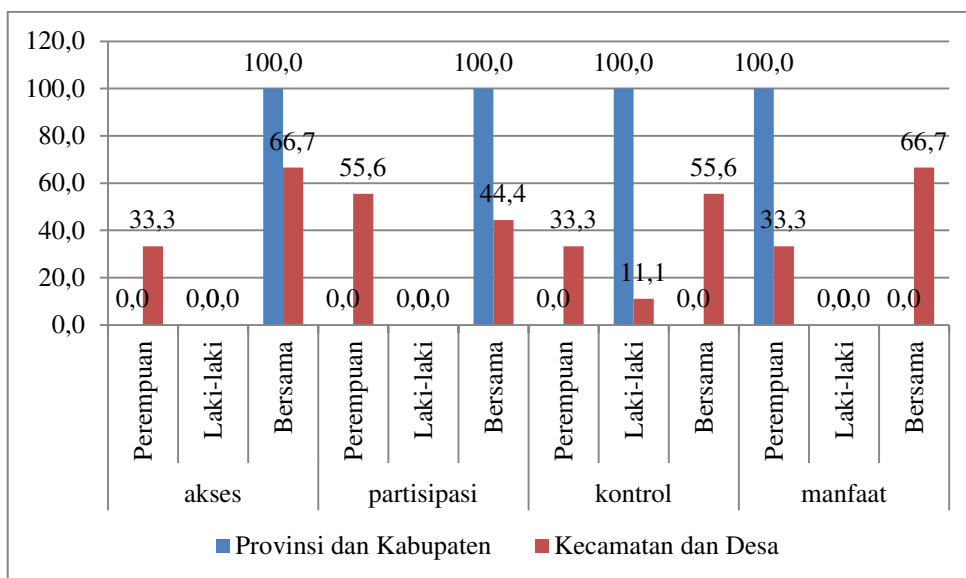
No	Program	Lokasi Program
1	Keluarga Berencana (KB)	Kabupaten dan Desa
2	Posyandu (Morgu Mulyo)	Kecamatan
3	Posyandu (Tb Jambu)	Kecamatan
4	BPJS	Kecamatan dan Desa
5	Posbindu Lansia	Kecamatan
6	Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Desa
7	Posbindu	Desa
8	Pelatihan dukun beranak	Desa

Gambar 10 menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pada program/kegiatan di bidang kesehatan lebih banyak dimiliki oleh perempuan (Posyandu) maupun secara bersama (perempuan dan laki-laki) yaitu pada program KB, BPJS, Posbindu dan Lansia. Laki-laki ada yang memiliki kontrol pada program KB terkait dengan dibolehkannya isteri untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak atau menunda kehamilan. Hal ini menggambarkan bahwa masih adanya kekuasaan laki-laki di luar perempuan yang menyangkut tubuh perempuan. Manfaat program di bidang kesehatan ini lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan laki-laki secara bersama.



Gambar 10. Program dan Kegiatan di Bidang Kesehatan yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur

Program KB yang merupakan program dari Kabupaten dan desa tampak diakses, diikuti, dan menerima manfaat oleh bersama (laki-laki dan perempuan) meskipun laki-laki yang muncul menjadi pihak yang menentukan kontrol dalam program ini. Sementara itu untuk program di bidang kesehatan di kecamatan/desa sudah dapat diakses oleh bersama (laki-laki dan perempuan) meski banyak juga perempuan yang berpartisipasi dan memiliki kontrol yang khas dari perempuan pada program di bidang kesehatan ini, seperti Posyandu dan Posbindu Lansia. Hal ini erat kaitannya dengan stereotype bahwa perempuan adalah penjaga keluarga (suami dan anak) sehingga dapat bekerja di sektor publik bidang kesehatan. Dengan demikian maka perempuan banyak yang bekerja di lingkup sosial sebagai tenaga kesehatan (kader Posyandu atau Posbindu) ini. Padahal kerja ini tidak banyak menghasilkan penghasilan di balik kerja yang harus perempuan lakukan. Bahkan untuk program seperti KB malah laki-laki yang memiliki kontrol. Dengan demikian maka program di bidang kesehatan ini lebih bersifat bias gender yang menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan.



Gambar 11. Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Kesehatan antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa

10.4. Bidang Politik

Hanya ada satu program yang ada dalam bidang politik ini yang dilaksanakan di kecamatan, yaitu Musrenbang. Akses dan manfaat dirasakan secara bersama baik oleh perempuan maupun laki-laki. Meskipun begitu dalam partisipasi dan kontrolnya berada pada laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam bidang politik dimana kepentingan perempuan masih diwakili oleh kelompok laki-laki atas kepentingan bersama warga desa.

Program Musrenbang ini sebetulnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan strategis namun nampaknya belum banyak memberikan hasil dimana hasil dari ketimpangan ini berupa masih sedikitnya perempuan yang menjadi pejabat publik di lembaga pemerintahan. Kondisi ketimpangan ini juga tercermin dari tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2014, yaitu 37,7% dari 212 calon tetap wanita namun hanya 16,7% yang terpilih. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki penilaian tersendiri yang terkait dengan peran publik perempuan sebagai wakil rakyat. Perlu adanya pendampingan agar perempuan dapat lebih banyak yang menyadari posisinya kini dan mau berperan dengan lebih luas lagi sebagai pengambil

kebijakan yang harapannya dapat menghasilkan program untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

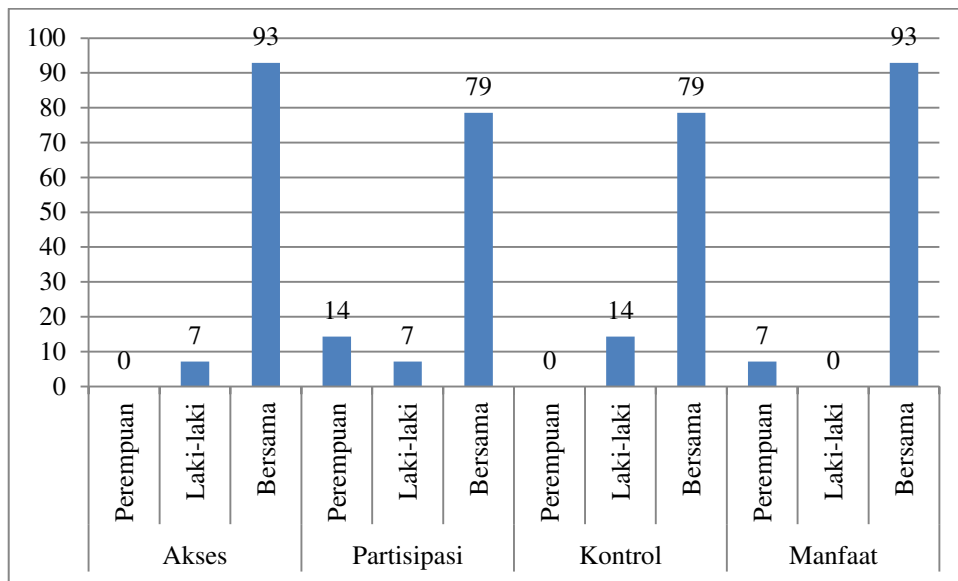
10.5. Bidang Sosial

Program dan kegiatan di bidang sosial yang berjalan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Harapan Makmur antara lain berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Pelatihan Karang Taruna, Penanganan Fakir Miskin seperti Bedah Rumah, dan lain-lainnya.

Tabel 37. Daftar Program di Bidang Sosial

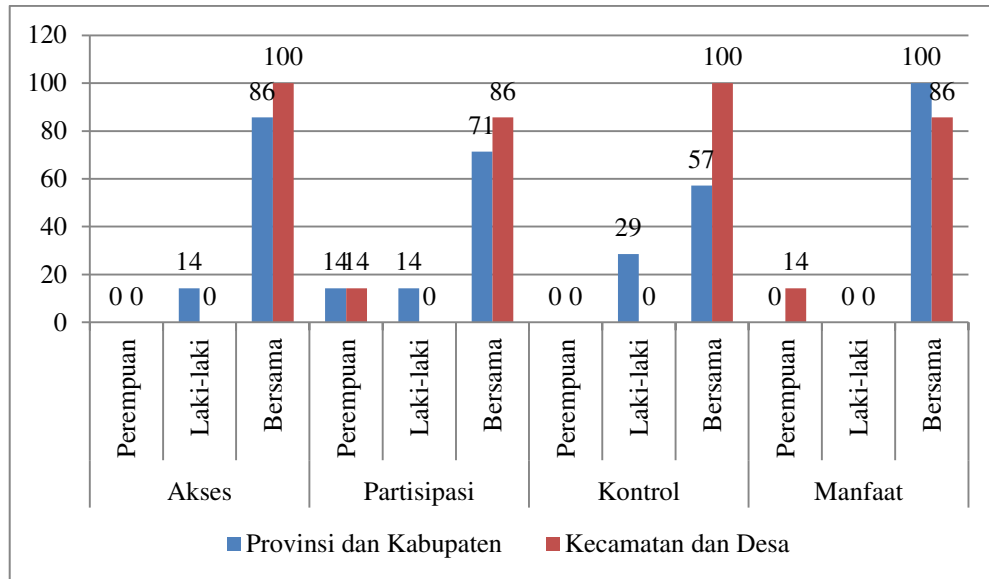
No	Program	Lokasi Program
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Provinsi
2	Pelatihan Karang Taruna	Provinsi
3	Penanganan Fakir Miskin seperti Bedah Rumah	Provinsi
4	Kampung Siaga Bencana	Provinsi
5	Pemberian bibit ke kelompok tani	Provinsi
6	Program isbat nikah (tahun lalu)	Kabupaten
7	Tabligh musibah	Kabupaten
8	Monitoring Raskin	Kabupaten
9	Pengajian 1 minggu sekali	Kecamatan
10	Bedah rumah	Kecamatan
11	Raskin	Kecamatan dan Desa
12	Sembako lansia setahun sekali (lansia)	Kecamatan
13	Arisan desa	Kecamatan
14	BLSM	Desa

Data pada Gambar 12 menunjukkan bahwa program dan kegiatan di bidang sosial ini sudah dibuka aksesnya untuk bersama (laki-laki dan perempuan). Meski pada partisipasi ada juga perempuan yang berpartisipasi dalam program kampung siaga bencana namun secara umum partisipasi dan kontrol pun dirasakan oleh bersama (laki-laki maupun perempuan). Dominasi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat program atau kegiatan oleh bersama (laki-laki dan perempuan) ini lebih banyak terjadi di Kecamatan/Desa dibandingkan pada program dari provinsi/kabupaten.



Gambar12. Program dan Kegiatan di Bidang Sosial yang dijalankan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur

Kegiatan di bidang sosial di provinsi/kabupaten terlihat ada yang lebih memberikan akses untuk laki-laki saja, seperti Karang Taruna. Meski begitu manfaat kegiatan Karang Taruna ini dirasakan bersama (laki-laki dan perempuan). Namun partisipasi dan kontrol hanya melibatkan laki-laki. Temuan menarik ada pada program Raskin dimana menurut penerima program di tingkat Kecamatan/Desa dianggap sudah dimiliki bersama kontrol atas kegiatan tersebut, namun bagi penyusun program yang memiliki kegiatan monitoring Raskin menyatakan bahwa keputusan untuk menerima atau tidaknya program tersebut masih dikontrol oleh laki-laki. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana program yang sudah didesain oleh penyusun program dapat menjadi berbeda dalam implementasinya ketika sudah ada di tangan penerima program di kecamatan/desa. Detail ini juga menggambarkan bagaimana budaya patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga mengontrol sumberdaya yang akan diaksesnya, masih menjadi perspektif yang digunakan penyusun program terhadap sumberdaya pangan Raskin.



Gambar 13. Perbandingan Profil Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa

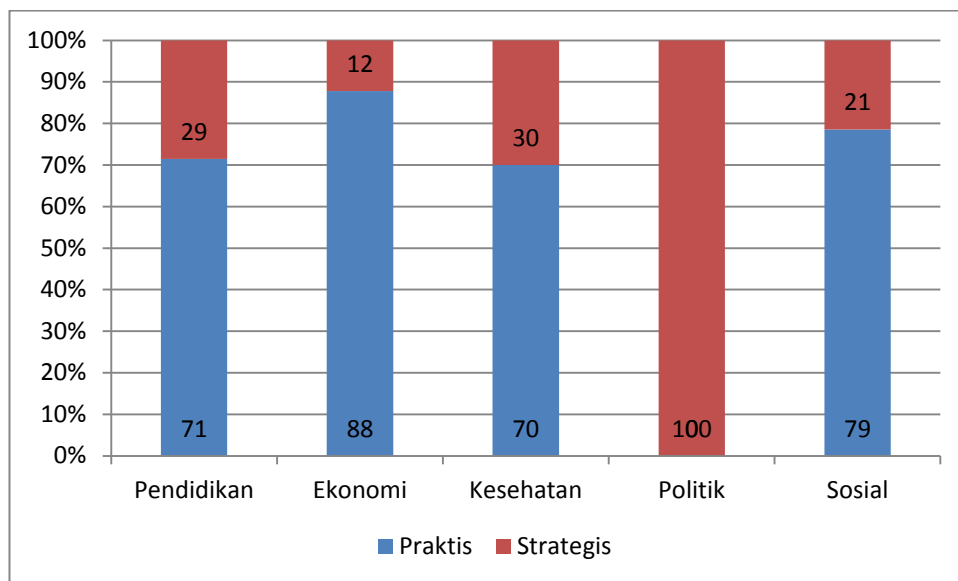
10.6. Sintesis Analisis Program dan Kegiatan dan Feminisasi Kemiskinan

Feminisasi kemiskinan tidak hanya tergambar dari data di tiap bidang yang disampaikan sebelumnya dalam profil feminisasi kemiskinan, namun juga pada bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan terhadap program-program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial yang ada di tingkat kecamatan/desa selaku penerima program. Hal ini juga dilengkapi dengan data mengenai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diberikan berdasarkan penyusun program di tingkat Provinsi/Kabupaten.

Dari uraian mengenai program dan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial yang dijalankan sejak dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga akhirnya di desa sudah lebih banyak program yang dapat diakses dan melibatkan (partisipasi) oleh bersama baik oleh perempuan dan laki-laki. Namun banyak program/bidang yang masih menunjukkan adanya laki-laki sebagai pemegang kontrol dari partisipasi perempuan dalam program/kebijakan tersebut. Hal ini juga terkonfirmasi baik berdasarkan penyusun program di lingkungan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bangkulu Tengah maupun pada penerima program yang menyatakan pola masih banyaknya kontrol yang dipegang laki-laki itulah yang terjadi di lokasi penelitian meskipun akses,

partisipasi, dan manfaat sudah dirasakan secara bersama oleh perempuan dan laki-laki. Hal ini mencerminkan masih kuatnya konstruksi sosial nilai patriarki pada masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan tersebut.

Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari sumberdaya berupa program dan kegiatan yang ada diakses warga inilah yang dianggap sebagai akar penyebab feminisasi kemiskinan. Oleh karena itu analisis perlu dilakukan mengenai bagaimana perempuan mengakses dan memperoleh manfaat dari program dan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial. Selain itu program pun dianalisis berdasarkan pemenuhan perempuan yang sudah dipenuhi yaitu Praktis atau Strategis. Semakin banyak program yang memenuhi kebutuhan strategis perempuan maka akan semakin terbuka peluang untuk mengurangi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan.



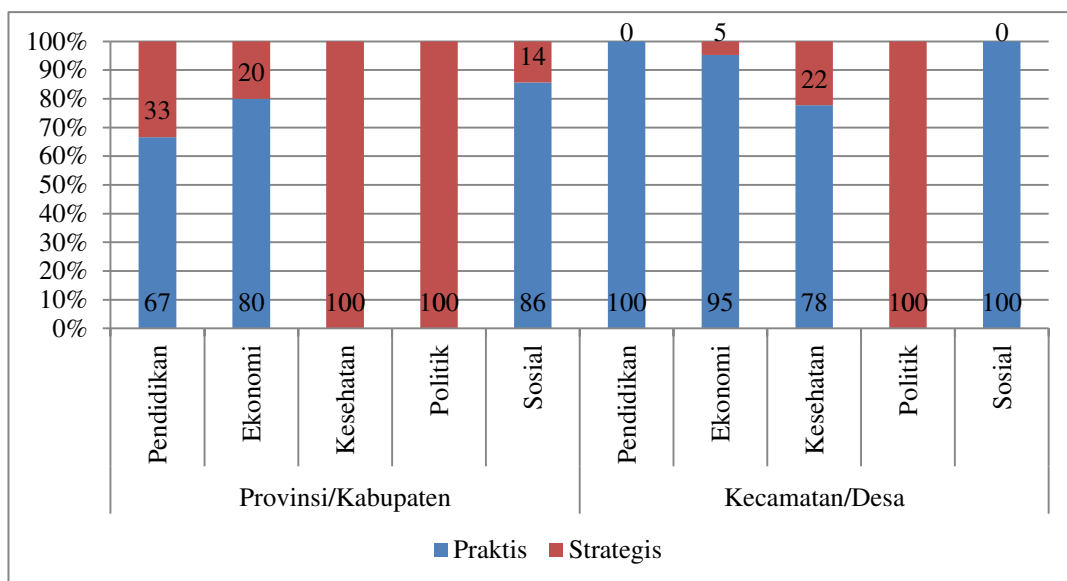
Gambar 14. Jumlah Program dan Kegiatan di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik, dan Sosial berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Harapan Makmur

Dalam **bidang pendidikan**, program dan kegiatan yang ada dan diakses oleh penerima manfaat di tingkat Kecamatan/desa menurut pemenuhan kebutuhan

ada 71% program yang masih memenuhi kebutuhan praktis (lihat Gambar 14). Hal ini merupakan hasil dari akumulasi analisis di tingkat penyusun dan penerima program. Pada Gambar 15 tampak bahwa program di bidang pendidikan yang diterima warga di kecamatan dan desa dinilai semuanya (100%) adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis sementara ada 67% program di provinsi/kabupaten yang dinilai sudah memenuhi kebutuhan praktis.

Salah satu program pendidikan yaitu BOS di kecamatan/desa dinilai hanya memiliki pemenuhan kebutuhan praktis dimana manfaatnya untuk membayar SPP dan kebutuhan sekolah lainnya. Sementara itu program BKR di kabupaten dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan strategis yakni membina keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja agar dapat memantau perkembangan anak remaja laki-laki maupun perempuan dari pendidikan dan pergaulan sehingga ke depan para remaja dapat berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Program BKR sudah mempertimbangkan agar posisi perempuan menjadi lebih setara terhadap laki-laki. Jadi lebih banyak program dan kegiatan di tingkat Kecamatan/desa yang dinilai memenuhi kebutuhan praktis dibandingkan di tingkat Provinsi/kabupaten.

Penyusun program di tingkat Provinsi/kabupaten maupun penerima program di tingkat Kecamatan/desa menilai bahwa program/kegiatan di bidang ini sudah memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama baik bagi perempuan maupun laki-laki baik di semua tingkat pelaksanaan program. Meskipun begitu program yang sudah berjalan ini tampaknya belum mampu mengalahkan kuatnya fakta adanya ketimpangan yang menunjukkan bahwa perempuan berumur 15 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan laki-laki yang tidak memiliki ijazah maupun rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal peran rata-rata lama sekolah dan ijazah sebagai tanda kelulusan sekolah sangat besar peranannya bagi perempuan dalam aktivitas produktif nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa program masih bersifat netral gender dari penyusun program dimana tidak dijalankan berdasarkan keberpihakan untuk memperbaiki posisi perempuan yang lebih banyak terpinggirkan dalam bidang pendidikan ini.



Gambar 15. Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan antara Penyusun Program di Provinsi/Kabupaten dan Penerima Program di Kecamatan/Desa

Data di **bidang ekonomi** menunjukkan adanya 88% program dan kegiatan yang dijalankan di Provinsi/kabupaten maupun Kecamatan/desa masih berada pada pemenuhan kebutuhan praktis. Program KUBE dan bantuan pupuk organik merupakan contoh dari program yang dinilai memenuhi kebutuhan praktis seperti untuk peningkatan pendapatan. Hal ini juga tercermin dalam jumlah program/kegiatan yang ada di Provinsi/kabupaten (80%) maupun kecamatan/desa (95%) yang dianggap memenuhi kebutuhan jangka pendek berupa pendapatan bagi keluarga dengan adanya pelatihan, pendampingan maupun bantuan prasarana produksi. Hasil ini menandakan bahwa program dan kegiatan yang sudah dilakukan belum membuahkan kesadaran untuk memperbaiki posisi perempuan saat ini karena sebagian besar kontrol dalam program/kegiatan tersebut pun dimiliki oleh laki-laki.

Pada program di bidang ekonomi ini menunjukkan bahwa akses pada 66% program sudah dibuka untuk bersama (perempuan dan laki-laki) yang dilaksanakan di tingkat provinsi namun hanya tinggal 30% program yang di dalamnya ada partisipasi oleh bersama (laki-laki dan perempuan) dan di dalamnya

sudah muncul partisipasi laki-laki. Kontrol pada program/kegiatan di bidang ekonomi ini lebih banyak pada laki-laki maupun secara bersama pada perempuan dan laki-laki sementara manfaat program di bidang ini lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan laki-laki secara bersama. Di tingkat penerima program, bahkan jumlah program dengan partisipasi dan kontrol pada program pada laki-laki lebih tinggi jumlahnya dibandingkan perempuan atau bersama. Dengan begitu maka secara umum program yang dijalankan di Provinsi/kabupaten lebih bersifat responsif gender bila dibandingkan di Kecamatan/desa yang netral gender.

Di sisi lain data BPS Bengkulu (2015) menunjukkan perempuan lebih rendah tingkat partisipasi angkatan kerja yang berarti lebih banyak sebagai Pekerja yang tidak dibayar dan bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki sehingga menggambarkan adanya subordinasi pada perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tekanan untuk terus melakukan aktivitas dalam ranah domestik dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk banyak berkontribusi dalam aktivitas ekonomi dengan lebih banyak bekerja di sektor informal. Dengan begitu maka ketimpangan akses warga pada program ditambah dengan adanya ketimpangan dalam ketenagakerjaan tersebut menyebabkan feminisasi kemiskinan karena posisi perempuan yang lebih rendah (tersubordinasi) dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan laki-laki dalam aktivitas ekonomi ini. Bagi perempuan yang memiliki aktivitas produktif pun akan memunculkan beban kerja bagi perempuan sehingga bagi perempuan yang lebih memilih peranannya kembali di sektor domestik maka ia merupakan pihak yang termarjinalkan akibat aktivitas ekonomi. Hal ini dapat mendorong munculnya feminisasi kemiskinan khususnya perempuan yang tidak memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan maupun menjadi kepala keluarga perempuan.

Dalam **bidang kesehatan**, terdapat 70% program/kegiatan yang sudah memenuhi kebutuhan praktis, seperti Posyandu dan Posbindu. Pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa dengan pemenuhan fasilitas/prasarana namun tidak memperbaiki relasi sosial laki-laki dan perempuan. Namun beberapa program seperti KB dan pelatihan Dukun Beranak termasuk sudah memenuhi kebutuhan strategis di Kabupaten dan Kecamatan/Desa. Pada program KB selain untuk mengatur jumlah dan jarak kehamilan dapat diatur, perempuan memiliki

kesempatan untuk turut mengambil keputusan dalam menentukan ber-KB serta memilih alat KB yang sesuai dengan dirinya. Hal ini merupakan gambaran bagaimana perempuan memiliki posisi yang lebih setara dengan menjadi pengambil keputusan dibandingkan laki-laki yang sudah lebih banyak mendominasi dalam ranah produktif atau sosial.

Namun pada program KB di Kabupaten, ditemukan bahwa laki-laki yang memiliki kontrol. Jadi meskipun programnya sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan strategis namun pada pelaksanaannya masih memungkinkan bagi laki-laki untuk lebih besar dalam mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan bahwa adanya nilai patriarki yang dilihat oleh pengelola program di kabupaten yang masih dijunjung oleh warga di kabupaten tersebut sebagai pengambil keputusan.

Program KB yang merupakan program dari Kabupaten dan desa tampak diakses, diikuti, dan menerima manfaat oleh bersama (laki-laki dan perempuan) meskipun laki-laki yang muncul menjadi pihak yang menentukan kontrol dalam program ini. Sementara itu untuk program di bidang kesehatan di kecamatan/desa sudah dapat diakses oleh bersama (laki-laki dan perempuan) meski banyak juga perempuan yang berpartisipasi dan memiliki kontrol yang khas dari perempuan pada program di bidang kesehatan ini. Stereotype mengenai perempuan adalah penjaga keluarga (suami dan anak) sehingga dapat bekerja di sektor publik bidang kesehatan. Dengan demikian maka perempuan banyak yang bekerja di lingkup sosial sebagai tenaga kesehatan (kader Posyandu atau Posbindu) ini. Padahal kerja ini tidak banyak menghasilkan penghasilan di balik kerja yang harus perempuan lakukan. Bahkan untuk program seperti KB malah laki-laki yang memiliki kontrol.

Kondisi ketimpangan lainnya dalam bidang kesehatan ini adalah lebih banyaknya perempuan yang terkena penyakit menular seksual serta masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Hal ini menggambarkan masih adanya subordinasi pada diri perempuan menjadi faktor yang menyebabkan menguatnya feminisasi kemiskinan akibat dampak pernikahan dini yang lebih merugikan perempuan karena harus ke luar dari sekolah; korban kekerasan akibat tersebarnya penyakit menular seksual, dan lebih banyaknya alat kontrasepsi yang disediakan

oleh pemerintah. Dengan demikian maka program di bidang kesehatan ini lebih bersifat bias gender yang menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan.

Musrenbang sebagai salah satu program di **bidang politik** yang sudah memenuhi kebutuhan strategis dimana memberikan peluang bagi perempuan untuk menyatakan kebutuhannya sehingga ia dapat menjadi lebih setara dengan laki-laki. Sementara itu di bidang sosial ditemukan bahwa 79% program termasuk sudah memenuhi kebutuhan praktis penduduk seperti kebutuhan pangan dan layanan kesehatan namun belum dibarengi dengan kesadaran untuk memperbaiki relasi dengan laki-laki. Sebanyak 85% jumlah program di bidang ini di tingkat pengelola program dan semua program di tingkat Kecamatan/desa termasuk memenuhi kebutuhan praktis. Hanya program Karang Taruna yang bagi pengelola program di Provinsi sudah dinilai dapat menjadi ruang bagi perbaikan relasi gender laki-laki dan perempuan dengan adanya kesamaan peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk berorganisasi dan berserikat mengeluarkan pendapat. Namun hal ini masih belum nampak manfaatnya dengan masih tingginya jumlah kekerasan pada perempuan baik data provinsi maupun kabupaten.

Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD belum terpenuhi. Meskipun program kuota 30% perempuan sebagai Calon Anggota Tetap dalam partai politik tersebut sudah responsif gender. Namun masyarakat Bengkulu Tengah yang ditengarai memiliki konstruksi budaya yang menjadikan ajaran agama Islam sebagai prinsip dalam berperilaku keseharian juga tampak memberikan pengaruh pada konstruksi peranan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat dimana laki-laki lebih dianggap mampu sebagai pemimpin dibandingkan perempuan sebagai warga kelas dua (subordinasi) dalam aktivitas publik. Hal inilah yang menjadikan perempuan tidak dapat memberikan suara terbanyaknya dalam parlemen untuk menyusun program yang responsif gender di bidang pemenuhan hak hidup lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun politik itu sendiri.

Dalam **bidang sosial**, ditemukan bahwa program/kegiatan sudah dibuka aksesnya untuk bersama (laki-laki dan perempuan). Dominasi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat program atau kegiatan oleh bersama (laki-laki dan perempuan) ini lebih banyak terjadi di Kecamatan/Desa dibandingkan pada

program dari provinsi/kabupaten. Jumlah program/kegiatan di Kecamatan/desa di bidang ini lebih banyak (semuanya) cenderung pada pemenuhan praktis dibandingkan dari Provinsi/kabupaten. Meski sebetulnya data menunjukkan adanya masalah sosial berupa kekerasan yang lebih banyak dialami perempuan dengan latar belakang SLTP dan SLTA maka dengan identifikasi program saat ini sifatnya adalah netral gender karena belum memihak salah satu jenis kelamin.

Dengan demikian maka secara umum program/kegiatan di lima bidang tersebut cenderung netral gender atau tidak menunjukkan keberpihakan sasaran program untuk laki-laki saja atau perempuan. Hal ini dikarenakan beberapa program ditujukan kepada peningkatan kualitas keluarga yang menempatkan suami dan istri sebagai sasaran program. Program tersebut turun dan menjadi netral gender karena tidak didasarkan pada data terpilah gender. Oleh karena itu untuk ke depan penyusunan data terpilah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan secara melembaga. Terlebih lagi dengan lebih dominannya program/kegiatan yang memenuhi kebutuhan praktis sehingga belum mampu memberikan kesadaran bagi perempuan untuk memperbaiki posisinya dibandingkan laki-laki, misalnya dalam aktivitas pembagian tugas dalam rumantangga, perluasan aset lahan maupun kredit, serta mengurangi kekerasan pada perempuan, sehingga muncul kemiskinan pada perempuan (femnisiasi kemiskinan).

XI. PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Kajian ini menggambarkan feminisasi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Harapan Makmur. Feminisasi kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterwakilan perempuan muncul dalam bentuk kemiskinan yang merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan hasil dari ketimpangan relasi gender yang dialami perempuan dari laki-laki sehingga berdampak pada keterbelakangan perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial.

Feminisasi kemiskinan tidak hanya tergambar dari data di tiap bidang yang disampaikan sebelumnya dalam profil feminisasi kemiskinan, namun juga pada struktur memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima perempuan dari program-program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial yang ada di tingkat kecamatan/desa selaku penerima program. Hal ini juga dilengkapi dengan data mengenai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diberikan berdasarkan penyusun program di tingkat Provinsi/Kabupaten. Dari sisi program dan kegiatan pembangunan sendiri dilihat dari 1) persepektif gender yang dimilikinya, yaitu netral, bias atau responsif gender maupun 2) kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan.

Dalam **bidang pendidikan**, penyusun program di tingkat Provinsi/kabupaten sepakat dengan penerima program di tingkat Kecamatan/desa bahwa program sudah memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara bersama baik bagi perempuan maupun laki-laki baik di semua tingkat pelaksanaan program. Program dan kegiatan sebanyak 71% ada dan diakses oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Namun masih lebih banyak program dan kegiatan di tingkat Kecamatan/desa yang dinilai memenuhi kebutuhan praktis dibandingkan di tingkat Provinsi/kabupaten. Hal ini juga menunjukkan bahwa program masih bersifat netral gender dari penyusun program dimana tidak

dijalankan berdasarkan keberpihakan untuk memperbaiki posisi perempuan yang lebih banyak terpinggirkan dalam bidang pendidikan ini dari rata-rata lama sekolah dan rendahnya kepemilikan ijazah dibandingkan laki-laki.

Data di **bidang ekonomi** menunjukkan adanya 88% program dan kegiatan yang dijalankan di Provinsi/kabupaten maupun Kecamatan/desa masih berada pada pemenuhan kebutuhan praktis. Hal ini juga tercermin dalam jumlah program/kegiatan yang ada di Provinsi/kabupaten (80%) maupun kecamatan/desa (95%) yang dianggap memenuhi kebutuhan tersebut. Pada bidang ini, jumlah program di Provinsi/kabupaten sudah ada partisipasi dari perempuan pada program yang aksesnya sudah dibuka pada laki-laki-laki dan perempuan. Partisipasi dan kontrol yang lebih banyak pada laki-laki maupun secara bersama pada perempuan dan laki-laki baik di Kecamatan/desa. Dengan begitu maka secara umum program yang dijalankan di Provinsi/kabupaten lebih bersifat responsif gender bila dibandingkan di Kecamatan/desa yang netral gender di tengah isu mengenai rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pada perempuan dibandingkan laki-laki, maupun lebih banyak sebagai Pekerja yang tidak dibayar dan bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki. Subordinasi, ancaman beban ganda maupun dapat menyebabkan feminisasi kemiskinan karena posisi perempuan yang lebih rendah (tersubordinasi) dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan laki-laki dalam aktivitas ekonomi ini.

Dalam **bidang kesehatan**, terdapat 70% program/kegiatan yang sudah memenuhi kebutuhan praktis. Laki-laki masih ada yang tampak memiliki kontrol pada bidang yang dilabelkan (stereotype) sebagai ranah perempuan (penjaga keluarga: suami dan anak) namun kerja ini tidak banyak menghasilkan penghasilan di balik kerja yang harus perempuan lakukan. Situasi perempuan yang harus dihadapi adalah laki-laki yang memiliki kontrol dalam program, rawannya perempuan yang terkena penyakit menular seksual, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta banyaknya alat KB untuk perempuan. Hal ini menggambarkan masih adanya subordinasi pada diri perempuan menjadi faktor yang menyebabkan menguatnya feminisasi kemiskinan. Dengan demikian maka program di bidang kesehatan ini lebih bersifat bias gender yang menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan.

Musrenbang sebagai salah satu program di **bidang politik** yang sudah memenuhi kebutuhan strategis dimana memberikan peluang bagi perempuan untuk menyatakan kebutuhannya sehingga ia dapat menjadi lebih setara dengan laki-laki. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD belum terpenuhi. Meskipun program kuota 30% perempuan sebagai Calon Anggota Tetap dalam partai politik tersebut sudah responsif gender. Namun masyarakat Bengkulu Tengah yang ditengarai memiliki konstruksi budaya yang menjadikan ajaran agama Islam sebagai prinsip dalam berperilaku keseharian juga tampak memberikan pengaruh pada konstruksi peranan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat dimana laki-laki lebih dianggap mampu sebagai pemimpin dibandingkan perempuan sebagai warga kelas dua (subordinasi) dalam aktivitas publik. Hal inilah yang menjadikan perempuan tidak dapat memberikan suara terbanyaknya dalam parlemen untuk menyusun program yang responsif gender di bidang pemenuhan hak hidup lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun politik itu sendiri.

Dalam **bidang sosial**, ditemukan bahwa program/kegiatan sudah dibuka aksesnya untuk bersama (laki-laki dan perempuan). Dominasi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat program atau kegiatan oleh bersama (laki-laki dan perempuan) ini lebih banyak terjadi di Kecamatan/Desa dibandingkan pada program dari provinsi/kabupaten. Jumlah program/kegiatan di Kecamatan/desa di bidang ini lebih banyak (semuanya) cenderung pada pemenuhan praktis (79%) dibandingkan dari Provinsi/kabupaten. Meski sebetulnya data menunjukkan adanya masalah sosial berupa kekerasan yang lebih banyak dialami perempuan dengan latar belakang SLTP dan SLTA maka dengan identifikasi program saat ini sifatnya adalah netral gender karena belum memihak salah satu jenis kelamin.

Dengan demikian maka secara umum program/kegiatan di lima bidang tersebut cenderung netral gender atau tidak menunjukkan keberpihakan sasaran program untuk laki-laki saja atau perempuan. Hal ini dikarenakan beberapa program ditujukan kepada peningkatan kualitas keluarga yang menempatkan suami dan istri sebagai sasaran program. Program tersebut turun dan menjadi netral gender karena tidak didasarkan pada data terpilah gender. Oleh karena itu untuk ke depan penyusunan data terpilah menjadi penting dan mendesak untuk

dilakukan secara melembaga. Terlebih lagi dengan lebih dominannya program/kegiatan yang memenuhi kebutuhan praktis sehingga belum mampu memberikan kesadaran bagi perempuan untuk memperbaiki posisinya dibandingkan laki-laki, misalnya dalam aktivitas pembagian tugas dalam rumantangga, perluasan aset lahan maupun kredit, serta mengurangi kekerasan pada perempuan, sehingga muncul kemiskinan pada perempuan (femnisiasi kemiskinan).

Dapat disimpulkan bahwa program dan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial yang dijalankan sejak dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga akhirnya di desa sudah lebih banyak program yang dapat diakses dan melibatkan (partisipasi) oleh bersama baik oleh perempuan dan laki-laki. Namun banyak program/bidang yang masih menunjukkan adanya laki-laki sebagai pemegang kontrol dari partisipasi perempuan dalam program/kebijakan tersebut. Hal ini mencerminkan masih kuatnya konstruksi sosial nilai patriarki pada masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan tersebut. Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari sumberdaya berupa program dan kegiatan yang ada diakses warga inilah yang dianggap sebagai akar penyebab feminisasi kemiskinan.

11.2 Rekomendasi

Data menunjukkan masih belum memadainya pemahaman yang dimiliki oleh aparat pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa maka perlu lebih digiatkan lagi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan instrument memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Jika tidak mengarusutamakan gender maka program yang dijalankan pun termasuk dalam netral gender yang berarti akan tetap terjadi ketimpangan gender dalam kebijakan yang disusunnya.

Hal ini dirasakan cukup mendesak dengan adanya Permendagri No 15 th 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah. Rekomendasi di

tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, termasuk di Provinsi Bengkulu ini. Dengan kondisi ini maka rekomendasi di tingkat provinsi dan kabupaten adalah:

5. Mendorong berjalannya kelembagaan PUG dengan prasyarat seperti:
 - a) komitmen;
 - b) kebijakan yang eksplisit di tingkat daerah,
 - c) struktur pemerintah seperti unit PUG untuk memastikan diselenggarakannya pengintegrasian perspektif gender;
 - d) sumberdaya yang memadai;
 - e) data terpilah; dan
 - f) alat analisis gender; dan
 - g) partisipasi masyarakat dalam mengontrol pada pemerintah.
6. PUG akan mengasikkan program strategis dan responsif gender untuk mengurangi ketimpangan perempuan dan laki-laki sehingga dapat mengurangi kemiskinan pada perempuan, seperti:
 - a) Perlindungan kekerasan pada korban;
 - b) Penyadaran hak perempuan dan kepemimpinan; dan
 - c) Pendidikan politik yang melibatkan perempuan
7. Menggandeng BAPPEDA agar sensitif gender dengan menyediakan alokasi penganggaran dari program yang responsive gender
8. Akun penganggaran PPRG agar menjadi Rencana Aksi Daerah yang akan diteruskan menjadi program SKPD.

Sementara itu rekomendasi di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut:

3. Pengajuan program melalui Musrenbang paling sedikit dihadiri oleh 30% perempuan dan adanya potensi bahwa usulan perempuan akan diakomodir
4. Penyusunan data terpilah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan secara melembaga sebagai dasar penyusunan program yang responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Badan Pusat Statistika. 2012. Kemiskinan Tiap Provinsi di Indonesia. BPS, Jakarta
- BPS, Badan Pusat Statistika. 2016. Kemiskinan Tiap Provinsi di Indonesia. BPS, Jakarta
- BPS, Badan Pusat Statistika Provinsi Bengkulu. 2014. Provinsi Bengkulu dalam Angka 2014. BPS, Jakarta
- BPS, Badan Pusat Statistika Provinsi Bengkulu. 2015. Provinsi Bengkulu dalam Angka 2014. BPS, Jakarta
- BPS, Badan Pusat Statistika Provinsi Bengkulu. 2015. Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 55/09/17/Th.IX, 15 September 2015 . BPS, Jakarta
- BPS, Badan Pusat Kabupaten Bengkulu Tengah. 2016. Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka tahun 2016 . BPS, Jakarta
- Cahyono. 2005: “ Wajah Kemiskinan Wajah Perempuan” Jurnal Perempuan,”Mengurai Kemiskinan: Di mana Perempuan?”, No.42, Tahun2005
- Chant, Sylvia 2009. The ‘Feminisation of Poverty’ in Costa Rica: To What Extent a Conundrum? *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 28, No. 1, pp. 19–43, 2009
- Jaggar, Alison M. 2013. Does Poverty Wear a Woman’s Face? Some Moral Dimensions of a Transnational Feminist Research Project. *Hypatia*: vol. 28, no. 2 (Spring 2013)
- ILO. 2004. Jender dan Kemiskinan. Kantor Perburuhan Internasional
- Kemenpppa, Kementian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Karakteristik Perempuan Kepala Rumah tangga. Diakses dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga>
- Moser, Caroline O.N. 1993. Gender Planning and Development. Theory, Practice, and Training. New York: Routledge

- Moghadam, V.M. 2005. *Globalizing women: Transnational feminist networks*. MD: The Johns Hopkins University Press. Baltimor
- Muhadjir, 2005; *Negara dan Perempuan*.Jogyakarta. CV. Adipura.
- PEKKA 2014. Annual Report. *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)/women headed households empowerment*
- Ritonga, Razali 2014. *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. BPS
- Ravallion, M. 2001. *Poverty Comparisons*. World Bank.
- Shiva, V & M, Mies. 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan &Lingkungan*. Terj dari Ecofeminismoleh Kelik Ismunanto & Lilik. IRE Press. Yogyakarta
- Soetrisno R. 2001. *Pemberdayaan masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta. Philosophy Press. Badan Kerjasama Fakultas Filsafat UGM.
- Suharto, Edi. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi*. Diakses di http://www.policy.hu/suharto/modul.a/makindo_32.htm pada tanggal 24 November 2008.
- Todaro. M.P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*(H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.